

**STRATEGI OPTIMALISASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN BERBASIS SPASIAL DI
KABUPATEN PRINGSEWU**

(Tesis)

Oleh

**RARA SUKMA
NPM 2020052001**



**PROGRAM STUDI MAGISTER PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
PASCASARJANA
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

STRATEGI OPTIMALISASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN BERBASIS SPASIAL DI KABUPATEN PRINGSEWU

Oleh

RARA SUKMA

Kawasan pengembangan pertanian tanaman pangan lahan basah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011-2031 sebesar 6.494 Ha dimana lebih rendah dari luasan yang tercantum pada Perda Kabupaten Pringsewu tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebesar 8.145 Ha. Perda yang seharusnya merupakan kebijakan spasial justru tidak mencantumkan lokasi yang ditetapkan menjadi LP2B sebagai acuan penerapannya sehingga rawan terjadi alih fungsi lahan pertanian. Penelitian ini bertujuan merumuskan pedoman spasial untuk mendukung kebijakan LP2B dalam mengendalikan alih fungsi lahan pertanian dan menentukan strategi prioritas dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan metode campuran menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif yang melibatkan pemerintah, pengelola lahan pertanian, dan akademisi. Pengambilan data dilakukan pada bulan November 2022 sampai Januari 2023. Analisis perumusan pedoman spasial dilakukan dengan menampilkan peta dengan menggunakan aplikasi ArcGIS 10.8, dan analisis penentuan strategi implementasi dilakukan dengan penentuan faktor menggunakan IFAS-EFAS yang kemudian diolah dengan SWOT dan QSPM untuk mendapatkan strategi prioritas. Hasil penelitian menunjukkan luas lahan sawah yang dapat ditetapkan menjadi LP2B di Kabupaten Pringsewu sebesar 8.159 hektare dengan hanya 3.270 hektare yang terdukung oleh irigasi. Strategi prioritas dalam optimalisasi implementasi kebijakan LP2B di Kabupaten Pringsewu yaitu melengkapi Perda PLP2B dengan spasial penentuan lokasi yang ditetapkan menjadi LP2B, penyusunan peta LP2B sebagai acuan untuk sosialisasi kepada masyarakat, meningkatkan koordinasi antar Pemerintah dalam rangka pemeliharaan dan perbaikan jaringan irigasi eksisting, pembangunan embung, dan delineasi lahan sawah berdasarkan kondisi terkini untuk melihat lahan potensial yang dapat dipetakan menjadi LP2B.

Kata kunci: kebijakan, lahan pangan, berkelanjutan

ABSTRACT

**STRATEGY TO OPTIMIZE THE IMPLEMENTATION OF SPATIAL-
BASED SUSTAINABLE FOOD AGRICULTURAL LAND POLICY IN
PRINGSEWU REGENCY**

By

RARA SUKMA

Development of wetland food farming area in the 2011-2031 RTRW Pringsewu Regency is 6,494 Ha, lower than the area stated in the Regional Regulation on Sustainable Food Agricultural Land Protection of 8,145 Ha. The regulation does not include locations designated as LP2B for its implementation, making it prone to conversion of agricultural land. This research aims to formulate spatial guidelines to support the LP2B policy in controlling agricultural land conversion and determine priority strategies in its implementation. The research method used in this research was descriptive analysis with mixed methods using qualitative and quantitative approaches involving the government, agricultural land managers, and academics. Data collection was carried out from November 2022 to January 2023. Analysis of spatial guidelines formulation was carried out by overlaying maps using the ArcGIS 10.8, and determining implementation strategies was carried out by determining factors using IFAS-EFAS analysis then processed with SWOT and QSPM to obtain priority strategies. The research results show that the rice fields area designated LP2B in Pringsewu Regency is 8,159 hectares with only 3,270 hectares supported by irrigation. Priority strategies in optimizing the implementation of the LP2B policy in Pringsewu Regency are complementing the PLP2B Regional Regulation with the spatial determination of locations designated as LP2B, preparing LP2B maps as a reference for outreach to the community, increasing coordination between governments in the context of maintaining and repairing existing irrigation networks, building embungs, and delineation of rice fields based on current conditions that can be mapped into LP2B.

Keywords: policy, agricultural land, sustainable;

**STRATEGI OPTIMALISASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN BERBASIS SPASIAL DI
KABUPATEN PRINGSEWU**

Oleh

RARA SUKMA

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

Pada

Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota
Pascasarjana Multidisiplin Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI MAGISTER PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
PASCASARJANA
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Tesis : **STRATEGI OPTIMALISASI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN BERBASIS SPASIAL
DI KABUPATEN PRINGSEWU**

Nama Mahasiswa : Rara Sukma

Nomor Pokok Mahasiswa : 2020052001

Program Studi : Magister Perencanaan Wilayah dan Kota

Fakultas : Pascasarjana Multidisiplin



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S
NIP. 196108261987021001

Dr. Ir. Muhammad Irfan Affandi, M.Si.
NIP. 196407241989021002

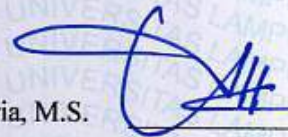
2. Ketua Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota

Dr. Ir. Muhammad Irfan Affandi, M.Si.
NIP. 196407241989021002

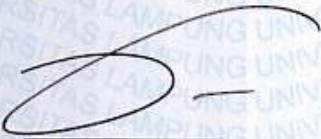
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S.



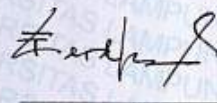
Sekretaris : Dr. Ir. Muhammad Irfan Affandi, M.Si.



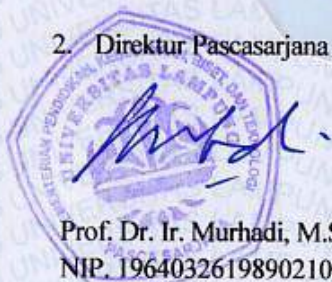
Penguji
Bukan Pembimbing : Dr. Ir. Citra Persada, M.Sc.



Anggota : Firdasari, S.P., M.E.P., Ph.D.



2. Direktur Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP. 196403261989021001

Tanggal Lulus Ujian Tesis: 7 Mei 2024

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul: **"STRATEGI OPTIMALISASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN BERBASIS SPASIAL DI KABUPATEN PRINGSEWU"** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 7 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,



Rara Sukma
NPM. 2020052001

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Cilacap, Jawa Tengah pada tanggal 24 Juli 1985, sebagai anak terakhir dari tiga bersaudara, putra dari Bapak Purwono Soewignjo dan Ibu Hartuti. Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) Srigunting Cilacap diselesaikan tahun 1991, Sekolah Dasar (SD) YKPP 02 Cilacap pada tahun 1997, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Cilacap pada tahun 2000, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 pada tahun 2003.

Tahun 2003, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Strata satu (S1) di Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Jurusan Teknik Arsitektur dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan menyelesaikan pendidikannya tahun 2009. Pada tahun 2010 penulis menjadi Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pringsewu dan kemudian beralih tugas menjadi Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Tata Guna Tanah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu. Penulis kemudian diamanahi menjadi Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang.

Pada tahun 2020 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Strata dua (S2) di Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Lampung. Penulis juga aktif sebagai anggota Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Provinsi Lampung dan terakhir bertugas sebagai anggota Bidang Sertifikasi Perencana dalam Pengurus Daerah IAP Lampung Periode Tahun 2021-2023.

Kepada Allah SWT

... wa laa tartadduu ‘alaa adbaarikum fatanqolibuu khosiriin

“..., dan janganlah kamu berbalik ke belakang, nanti kamu menjadi orang yang rugi“

(QS. Al-Maidah: 21)

Kepada Bapak, Ibu, Mbak, Mas, Papa, dan Anak-Anak Tercinta

SANWANCANA

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya resis ini dapat diselesaikan.

Tesis dengan judul “*Strategi Optimalisasi Implementasi Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Berbasis Spasial di Kabupaten Pringsewu*” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Perencanaan Wilayah dan Kota di Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S., selaku Dosen Pembimbing pertama atas kesediaannya memberikan bimbingan, saran, nasihat, dan ilmu yang bermanfaat selama proses penyelesaian tesis ini;
3. Bapak. Dr. Ir. Muhammad Irfan Affandi, M.Si., selaku Ketua Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, sekaligus juga Dosen Pembimbing kedua atas arahan, bimbingan, ketulusan hati, kesabaran, nasihat, motivasi dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama proses penyelesaian tesis;
4. Bapak (Alm.) Dr. Ir. Hanung Ismono, M.P., selaku Dosen Pembahas/Penguji saat seminar proposal untuk berbagi pengalaman, memberikan arahan dan bimbingan dalam proses penyempurnaan tesis ini;
5. Ibu Dr. Ir. Ktut Murniati, M.T.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis;
6. Dr. Ir. Citra Persada, M.Sc., selaku Dosen Pembahas/Penguji atas arahan, bimbingan, kesabaran, semangat, ketulusan hati, berbagi pengalaman, saran dan masukan kepada penulis untuk proses penyempurnaan tesis;

7. Firdasari, S.P., M.E.P., Ph.D., selaku Dosen Penguji atas arahan, masukan, dan pengalaman dalam rangka penyempurnaan tesis ini;
8. Seluruh dosen pengajar dan staf administrasi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Lampung atas ilmu dan bantuan dalam proses pembelajaran dan penyelesaian akademik;
9. Bapak Purwono Soewignjo dan Ibu Hartuti yang tidak henti memberikan semangat dan dukungan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan memenuhi harapan beliau;
10. Ayah (Alm.) Nabhan dan Mak (Alm.) Nisdalena untuk semua pengertian dan kasih sayangnnya kepada penulis dari sejak menjadi menantu sampai akhir hayat beliau berdua;
11. Papa Hendra Noviansyah untuk dukungan, kasih sayang dan pengertiannya, terima kasih sudah menjadi suami terbaik;
12. Dang Muhammad Al Fatih Al Muharram, Kakak Kayyisa Shidqiyah, dan Adik Qonita Zameena untuk kasih sayang dan pengertiannya, terima kasih sudah menjadi anak-anak hebat;
13. Kakak-kakak (drg. Sekar Tadjji, M.D.Sc., Sp.KGA, Tri Wied, S.P., Rangga Panji, S.T., Irma Nurul Fatimah, S.T.) dan adik-adik (Rahmat Hidayat, S.H., Anisa Rahmasari S.H., Rizki Ahsanal Huda, S.Pd., Imam Al Amin) untuk semangat dan dukungannya;
14. Bapak Akhmad Fadoli, M.Si., selaku pimpinan penulis atas bimbingan, arahan, dukungan dan motivasi kepada penulis;
15. Rekan-rekan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu khususnya Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (Kakak Liza, Boy Fatkur, Pitri, Ancha, Erwin, Hafizh, dan Sekar) atas segala bantuan dan dukungannya;
16. Sahabat tercinta (Nila, Nisa, Nella, Merry, Yossy) atas semangat dan dukungannya;
17. Rekan seperjuangan perkuliahan Dian Oktavia, S.E., M.P.W.K., Asila Jelita Maharani, S.P., M.P.W.K., Ayla Vilin Windyata, S.P., Marita Infia Fitriani, S.P., Mufidah Aulia Annisa, S.T., Yolanda Agustina, S.P., dan Satria Arif Gumelar, S.P., yang saling menguatkan dan memberikan semangat.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna dan dengan segala kekurangan yang ada, semoga tesis ini bermanfaat bagi para pembaca dan khususnya peneliti dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan. Semoga Allah SWT memberikan balasan terbaik atas segala jasa yang telah diberikan. *Aamiin ya Robbal'alaamiin*

Bandar Lampung, 7 Mei 2024

Penulis,

Rara Sukma

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xviii
 I. PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
 II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	 8
A. Tinjauan Pustaka	8
1. Teori Perencanaan	8
2. Teori Kebijakan	9
3. Implementasi Kebijakan	11
4. Teori Hak Kepemilikan	14
5. Teori Pertumbuhan Ekonomi	15
6. Teori Strategi	19
7. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	20
8. Strategi Penerapan Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	25
9. Penelitian Terdahulu	29
B. Kerangka Pemikiran	60
 III. METODE PENELITIAN	 64
A. Metode Penelitian	64
B. Konsep Dasar dan Batasan Operasional	65
C. Lokasi, Responden, dan Waktu Penelitian	67
D. Jenis dan Metode Pengumpulan Data	69
E. Metode Analisis Data	70
 IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	 83
A. Letak Geografis dan Batasan Administrasi	83
B. Kondisi Fisik	85
C. Kondisi Demografi	87
D. Kondisi Ekonomi	90

E. Prasarana Wilayah	96
F. Kondisi Lahan Pertanian Kabupaten Pringsewu	98
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	107
A. Identifikasi Lahan Pertanian Potensial sebagai Pedoman Spasial untuk Diintegrasikan dalam Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	107
B. Identifikasi Faktor Kekuatan (<i>Strenght</i>), Kelemahan (<i>Weakness</i>), Peluang (<i>Opportunity</i>), dan Ancaman (<i>Threat</i>) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	132
C. Strategi Optimalisasi Impelentasi Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Berbasis Spasial di Kabupaten Pringsewu	141
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	164
A. Kesimpulan	164
B. Saran	166
DAFTAR PUSTAKA	167
LAMPIRAN	176

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Hasil Inventarisasi Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Provinsi Lampung ...	25
2. Penelitian tentang Implementasi Kebijakan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Strategi	34
3. Alur Berpikir Penelitian	63
4. Data Responden Penelitian	68
5. Jenis dan Kebutuhan Sumber Data	70
6. Pembobotan IFAS	75
7. Pembobotan EFAS	75
8. Analisis IFAS	76
9 Analisis EFAS	77
10. Matriks <i>Grand Strategy</i> Analisis Kuadran SWOT	79
11. Analisis SWOT	80
12. Analisis QSPM	82
13. Luas Wilayah Kabupaten Pringsewu per Kecamatan	84
14. Luas Wilayah Kabupaten Pringsewu per Kecamatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri	85
15. Tingkat Elevasi Lahan di Kabupaten Pringsewu	86
16. Jumlah dan Sebaran Penduduk di Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2021	87
17. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2021	88

18.	Kepadatan Penduduk di Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2021	89
19.	PDRB Kabupaten Pringsewu Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (Milyar Rupiah)	90
20.	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2021	91
21.	PDRB Kabupaten Pringsewu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (Milyar Rupiah)	93
22.	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2021	95
23.	Perubahan Luas Lahan Pertanian dan Lahan Non Pertanian Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 – 2020 (dalam Hektar)	99
24.	Perbandingan Luas Lahan Sawah yang Terdukung dan Tidak Terdukung Daerah Irigasi	115
25.	Luas Sawah per Kecamatan Berdasarkan Pola Tanam	118
26.	Perbandingan Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Pringsewu pada Peraturan Daerah dengan Hasil Analisis (dalam Hektare)	127
27.	Hasil Skor Faktor Internal	133
28.	Hasil Skor Faktor Eksternal	135
29.	Matriks Analisis IFAS	137
30.	Matriks Analisis EFAS	138
31.	Pembobotan Diagram SWOT untuk Faktor Internal dan Faktor Eksternal Strategi Implementasi Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Pringsewu	141
32.	Matriks <i>Grand Strategy</i> Analisis Kuadran SWOT Strategi Optimalisasi Implementasi Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Pringsewu	143
33.	Matriks SWOT Strategi Optimalisasi Implementasi Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Pringsewu	145

34.	Matriks QSPM	150
35.	Total Skor Alternatif Strategi	152
36.	Pengelompokan Strategi berdasarkan Dimensi Waktu	159
37.	Jaringan Irigasi Kabupaten Pringsewu	177
38.	Rekap Kuisisioner 1	183
39.	Rekap Kuisisioner 2	206

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Berpikir Penelitian	62
2. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pringsewu ...	93
3. Grafik Perubahan Guna Lahan Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 – 2020 (dalam Hektar)	100
4. Grafik Perubahan Guna Lahan Pertanian (Sawah dan Non Sawah) Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 – 2020 (dalam Hektar)	100
5. Peta Guna Lahan Kabupaten Pringsewu Tahun 2012	103
6. Peta Guna Lahan Kabupaten Pringsewu Tahun 2017	104
7. Prosentase Perbandingan Luasan Guna Lahan terhadap Luas Wilayah Kabupaten Pringsewu Tahun 2012	105
8. Prosentase Perbandingan Luasan Guna Lahan terhadap Luas Wilayah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017	105
9. Peta Luas Lahan Sawah Eksisting di Kabupaten Pringsewu	108
10. Peta Luas Lahan Sawah Berdasarkan Rencana Pola Ruang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu	109
11. Peta Luas Lahan Sawah per Kecamatan Berdasarkan <i>Overlay</i> Sawah Eksisting dan Pola Ruang	110
12. Peta Sebaran Daerah Irigasi Kabupaten Pringsewu	113
13. Peta Jaringan Irigasi Kabupaten Pringsewu	114
14. Peta Lahan Sawah yang Terdukung Daerah Irigasi Kabupaten Pringsewu	116
15. Peta Lahan Sawah yang Terdukung Irigasi Kabupaten Pringsewu	117

16.	Peta Sebaran Pola Tanam Kabupaten Pringsewu	122
17.	Peta Sebaran Pola Tanam Dua sampai Tiga Kali dalam Setahun Kabupaten Pringsewu	123
18.	Peta Luas Lahan Sawah per Kecamatan Berdasarkan <i>Overlay</i> Sawah Terdukung Irigasi dan Sebaran Pola Tanam 2-3 Kali ...	124
19.	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Pringsewu	126

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertanian merupakan sektor penting dalam kehidupan manusia. Selain itu pertanian menjadi sektor basis pada mayoritas wilayah yang terdapat di Indonesia, tidak terkecuali dengan Kabupaten Pringsewu. Kabupaten Pringsewu memiliki total luas wilayah sebesar 617,19 km² atau 61.719 hektare dengan luas lahan sawah hampir mencapai 20 persen dari total luas wilayah kabupaten. Kabupaten Pringsewu juga menjadi wilayah yang diamanatkan menjadi wilayah wajib ketahanan pangan Provinsi Lampung sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029.

Saat ini banyak terjadi perubahan penggunaan lahan di beberapa daerah tidak terkecuali Kabupaten Pringsewu. Perubahan penggunaan lahan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain adalah pemenuhan akan kebutuhan sekunder manusia berupa tempat tinggal (Prasada dan Priyanto, 2019). Kebutuhan akan tempat tinggal berkaitan erat dengan aktivitas masyarakat pada sebuah wilayah sehingga dibutuhkan perencanaan wilayah yang tepat. Demikian pula dengan lahan pertanian yang berkaitan erat dengan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), apabila tidak dilakukan perencanaan yang tepat maka pengurangan luasan lahan pertanian akan menjadi tidak terkontrol.

Perencanaan pembangunan wilayah yang dilakukan sebaiknya menggunakan pendekatan sektoral dan pendekatan regional (Tarigan, 2005). Pendekatan

sektoral adalah pendekatan dimana analisis dilakukan per sektor yang terdiri dari seluruh kegiatan ekonomi dalam lingkup wilayah perencanaan. Dalam pendekatan sektoral, analisis tidak hanya dilakukan per sektor namun juga dilakukan analisis keterkaitan antarsektor. Salah satu analisis dalam pendekatan sektoral adalah analisis masukan-keluaran (*input-output analysis*) yang memiliki sifat pengganda (*multiplier*) dimana perubahan sebuah sektor akan mendorong perubahan pada sektor lainnya.

Pendekatan selanjutnya dalam perencanaan pembangunan wilayah adalah pendekatan regional. Pendekatan regional adalah pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan analisis wilayah. Perbedaan dengan pendekatan sektoral dengan pendekatan regional adalah pendekatan sektoral lebih menekankan analisis pada sektor atau komoditas, sedangkan pendekatan regional lebih memperhatikan ruang termasuk kondisi di dalamnya. Pendekatan ruang memperhatikan struktur ruang, penggunaan lahan saat ini, dan kaitan wilayah tersebut dengan wilayah tetangga.

Lahan pertanian didefinisikan sebagai bidang lahan yang digunakan sebagai lahan pertanian sehingga lahan pertanian pangan dapat diartikan sebagai bidang lahan yang digunakan untuk pertanian pangan. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tersebut disebutkan perlindungan lahan pertanian pangan merupakan upaya yang tidak terpisahkan dari reforma agraria. Perlindungan lahan pertanian pangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penataan ruang wilayah. Untuk itu, perlindungan lahan pertanian pangan perlu dilakukan dengan menetapkan kawasan-kawasan pertanian pangan yang perlu dilindungi.

Kawasan pertanian pangan merupakan bagian dari penataan kawasan perdesaan pada wilayah kabupaten. Dalam kenyataannya lahan-lahan pertanian pangan berlokasi di wilayah kota juga perlu mendapat perlindungan. Perlindungan kawasan pertanian pangan dan lahan pertanian pangan meliputi perencanaan dan penetapan, pengembangan, penelitian, pemanfaatan dan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pengembangan sistem informasi, perlindungan dan pemberdayaan petani, peran serta masyarakat, dan pembiayaan.

Berdasarkan amanat yang tersebutkan maka setiap daerah di Indonesia mempunyai kewajiban untuk melakukan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Lampung sudah menetapkan luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Provinsi Lampung sebesar 327.835 hektare yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2013. Luasan tersebut nantinya perlu didetailkan kembali oleh masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Lampung melalui Peraturan Daerah.

Kabupaten Pringsewu mengalokasikan kawasan peruntukan pertanian seluas kurang lebih 35.793 hektare dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011-2031 yang meliputi kawasan pertanian tanaman pangan, kawasan pertanian hortikultura, kawasan perkebunan, dan kawasan peternakan. Kawasan pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan seluas kurang lebih 10.823 hektare yang meliputi pertanian tanaman pangan lahan basah seluas kurang lebih 6.494 hektare, sentra pengembangan ubi kayu, jagung, kacang-kacangan dan sayur-sayuran atau hortikultura seluas kurang lebih 4.329 hektare yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Pringsewu. Luasan tersebut tidak sesuai dengan luasan yang tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Kabupaten Pringsewu juga sudah menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Pringsewu. Dalam peraturan tersebut sudah menyebutkan luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Pringsewu sebesar 8.145 hektare yang tersebar di sembilan kecamatan yang terdapat di Kabupaten Pringsewu, namun pada Peraturan Daerah tersebut tidak mencantumkan peta sebaran lokasi yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai acuan penerapannya. Tidak tersedianya pedoman spasial pada Peraturan Daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadikan implementasi kebijakan tersebut menjadi tidak optimal di Kabupaten Pringsewu.

Terdapat peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2017 pada lahan bukan pertanian justru setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Pringsewu walaupun tidak disertai dengan penurunan lahan pertanian. Hal ini dapat menunjukkan perubahan guna lahan dapat terjadi juga terhadap lahan sawah mengingat kebutuhan lahan untuk permukiman akan meningkat seiring bertambahnya penduduk dari tahun ke tahun.

Kebutuhan akan tersedianya pedoman spasial menjadi penting sebagai usaha implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang sudah ada agar tidak terjadi penurunan luasan lahan pertanian khususnya alih fungsi lahan sawah. Pedoman spasial berupa sebaran lahan sawah yang ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini perlu selaras dengan kebijakan yang ada sehingga diperlukan integrasi pedoman spasial kedalam kebijakan tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan alternatif strategi sebagai upaya optimalisasi implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Pringsewu.

B. Perumusan Masalah

Perkembangan wilayah Kabupaten Pringsewu ditandai dengan adanya pembangunan di berbagai sektor. Dimana sejalan dengan hal tersebut, terjadi alih fungsi lahan pertanian yang masif dan tidak terkontrol sehingga mengancam keberadaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Hal ini tentu ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan. Alih fungsi lahan-lahan pertanian selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan atau mempertahankan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial maupun melakukan pengamanan alih fungsi lahan pertanian. Alih fungsi lahan pertanian pangan juga menyebabkan makin sempitnya luas lahan yang diusahakan dan sering berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan petani. Kecilnya luas garapan petani juga disebabkan oleh peningkatan jumlah rumah tangga petani yang tidak sebanding dengan luas lahan yang diusahakan. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan dapat menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan menuju kemandirian pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.

Lahan pertanian pangan berkelanjutan juga menjadi penting dalam perencanaan tata ruang. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang harus mencantumkan luasan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dimana LP2B merupakan bagian dari KP2B. Selain itu, dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus tertera secara spasial dalam Peta Rencana Pola Ruang.

Permasalahan utama dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian adalah Peraturan Daerah mengenai Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

yang belum bisa diimplementasikan (Pitaloka, 2020; Wicaksono, 2020). Laju alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian di Kabupaten Pringsewu semakin tinggi, yang tidak saja mengancam ketahanan pangan, tetapi juga mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan berupa lahan kritis, erosi tanah dan sedimentasi yang meningkat selain itu terdapat banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau juga semakin besar kemungkinan terjadinya (Handari, 2012). Melalui Undang Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, diharapkan adanya dorongan dalam penyediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan, untuk mencegah hilangnya manfaat perlindungan lingkungan. Pada Kabupaten Pringsewu diperlukan acuan berupa pedoman spasial yang terintegrasi dengan Peraturan Daerah sehingga perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi lebih optimal.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik permasalahan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merumuskan sebaran lahan sawah yang dapat ditetapkan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai pedoman spasial untuk diintegrasikan dengan kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan?
2. Bagaimana alternatif strategi prioritas dalam optimalisasi implementasi kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Pringsewu?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan penelitian yang sudah disebutkan di atas maka dapat diambil kesimpulan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Merumuskan sebaran lahan sawah per kecamatan sesuai kondisi eksisting yang dapat ditetapkan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai pedoman spasial untuk diintegrasikan dengan kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam mengendalikan alih fungsi lahan pertanian.

2. Menentukan alternatif strategi prioritas dalam rangka optimalisasi untuk mengimplementasikan kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Pringsewu.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

1. Bagi pemangku kebijakan, sebagai rekomendasi penentuan lokasi dan strategi prioritas dalam implementasi kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
2. Bagi peneliti lain, sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Tinjauan Pustaka

1. Teori Perencanaan

Teori perencanaan adalah proses perencanaan, dimana teori perencanaan mengamati komponen-komponen dalam proses perencanaan yang mencakup bentuknya, tahapannya, hubungannya dengan konteks daripada proses perencanaan dan keluarannya serta menyangkut alasan mengapa perencanaan itu diperlukan. Teori perencanaan membahas definisi, pemahaman konteks, praktek-praktek, dan proses-proses dalam perencanaan, dan bagaimana pertumbuhannya dari asal-usul sejarah dan kebudayaan masing-masing (Anshar, 2014). Pada perencanaan terdapat dua teori yaitu

- a. Teori merencana (*theory of planning*); dan
- b. Teori di dalam perencanaan (*theory in planning*).

Terdapat beberapa teori mengenai teori perencanaan wilayah, yaitu:

- a. Teori perencanaan radikal, yang menekankan kebebasan lembaga untuk melakukan sendiri perencanaan;
- b. Teori perencanaan partisipasi, memfokuskan pada keterlibatan masyarakat baik individu maupun kelompok dalam mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan kebijakan yang ada;
- c. Teori perencanaan advokasi, berfungsi sebagai alat mendukung pertanyaan yang saling berkompetisi dengan kondisi masyarakat yang membangun dan dibangun;

- d. Teori perencanaan strategis, mengarahkan tujuan dan cara mendapatkan tujuan tersebut;
- e. Teori *mixed scanning*, merupakan pendekatan pengambilan keputusan yang bersifat fundamental dan incremental;
- f. Teori perencanaan komprehensif, digunakan dengan membuat alternatif dalam menyelesaikan beberapa masalah yang dapat dibandingkan satu dengan yang lain;
- g. Teori lokasi pertanian (Von Thunen); menjelaskan jenis pertanian berkembang di sekeliling daerah perkotaan sebagai pasar komoditas pertanian;
- h. Teori biaya kecil (Weber); lokasi industri dipengaruhi oleh biaya transportasi, biaya tenaga kerja, dan kekuatan aglomerasi;
- i. Teori tempat pusat (Christaller); kota kecil bergantung kepada kota besar;
- j. Teori konsentrik (Burgess); menyatakan perkembangan kota mengikuti pola konsentrik;
- k. Teori sektor (Hoyt); menyatakan perkembangan kota mengarah ke jalur jalan tertentu;
- l. Teori lokasi (Losch); menyarankan pemilihan lokasi industri ditempatkan di pasar atau mendekati pasar.

Persepsi adalah pengalaman tentang obyek, peristiwa, dan hubungan yang diperoleh dengan menafsirkan pesan dan menyimpulkan informasi (Iskandar et al., 2016). Persepsi masyarakat adalah proses dimana sekelompok manusia yang beraktivitas bersama dalam suatu wilayah serta memberikan pemahaman atau tanggapan terhadap hal-hal atau peristiwa yang terjadi dilingkungannya.

2. Teori Kebijakan

Terdapat beberapa pengertian mengenai kebijakan. Menurut Hoogerwerf, kebijakan adalah jalan keluar dari permasalahan dengan usaha untuk

memecahkan, mengurangi, mencegah masalah dengan cara tertentu dengan tindakan terarah. Sedangkan menurut Anderson, kebijakan diartikan sebagai perilaku sejumlah atau serangkaian pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam bidang tertentu (Fahmi, 2010). Pengertian lain mengenai kebijakan adalah pilihan Pemerintah mengenai langkah yang harus maupun tidak dilakukan dalam menghadapi permasalahan dimana ruang lingkupnya meliputi berbagai sektor pembangunan (Anwar, 2020), dimana perlu kerjasama seluruh pemangku kepentingan untuk berhasilnya implementasi kebijakan dengan memperhatikan lingkungan (RKH Nugrahani, 2019; Silfiana dan Samsuri, 2019).

Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul manakala *policy output* dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan. Keberhasilan kebijakan atau program dikaji berdasarkan perspektif proses implementasi dimana keberhasilan pelaksanaan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan, mencakup cara dan agen pelaksanaan, kelompok sasaran, serta manfaat program. Selain itu keberhasilan kebijakan dikaji dari perspektif hasil, dimana program membawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu program bisa saja berhasil dilihat dari sudut proses, akan tetapi bisa saja gagal jika ditinjau dari dampak yang dihasilkannya.

Kebijakan disusun dan dirancang untuk mengarahkan perilaku kelompok target sesuai dengan bunyi dan rumusan kebijakan tersebut sering kali menggunakan pendekatan yang disebut sebagai kebijakan regulatif atau kebijakan perintah. Dalam pendekatan ini, kebijakan tersebut memuat peraturan atau perintah yang jelas dan mengikat, yang menetapkan apa yang diharapkan dari kelompok target dan mengatur tindakan yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan. Dapat disimpulkan kebijakan adalah tindakan-tindakan maupun kegiatan-kegiatan yang berupa

pengambilan keputusan dan arah tindakan tertentu untuk memecahkan masalah atau hambatan dalam mencapai tujuan tertentu.

Keberhasilan sebuah kebijakan dapat dilihat dari implementasi kebijakan tersebut, dimana efektif tidaknya sebuah implementasi kebijakan dipengaruhi oleh pelaku kebijakan, level dan isi kebijakan publik tersebut, serta lingkungan kebijakan

3. Implementasi Kebijakan

Implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau proses yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan (Budi et al., 2013). Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Secara sederhana implementasi dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Implementasi suatu kebijakan pada dasarnya adalah suatu perubahan atau transformasi yang bersifat multiorganisasi, di mana perubahan yang diterapkan melalui strategi optimalisasi implementasi kebijakan ini mengaitkan berbagai lapisan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan sangat ditentukan oleh strategi kebijakan yang tepat yang mampu mengakomodasi berbagai pandangan dan kepentingan yang berbeda dalam masyarakat (Gita dan Mulyadi, 2019). Dimana implementasi kebijakan merupakan kegiatan mendistribusikan keluaran kebijakan yang dilakukan oleh para pelaksana kepada kelompok sasaran sebagai upaya mewujudkan tujuan kebijakan. Implementasi ini biasanya selesai setelah dianggap permanen. Implementasi dapat diartikan pula sebagai proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Implementasi kebijakan adalah proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut, dimana implementasi juga digambarkan sebagai wujud dari pelaksanaan kebijakan yang telah di tentukan.

Proses implementasi pada umumnya dilakukan melalui sejumlah tahap yang dimulai dengan ditetapkan regulasi yang diikuti dengan pelaksanaan regulasi tersebut oleh pemangku kepentingan terkait (Wicaksono, 2020). Implementasi kebijakan menyangkut perilaku pemangku kepentingan yang bertanggungjawab secara administratif terhadap pelaksanaan program sehingga kelompok sasaran kebijakan dapat melaksanakan regulasi tersebut termasuk masalah ekonomi sosial yang terlibat baik berpengaruh positif maupun negatif. Implementasi kebijakan, sebagaimana dikemukakan oleh Smith, merupakan suatu proses atau alur (Tachjan, 2006). Model Smith ini memandang proses implementasi kebijakan dari perspektif perubahan sosial dan politik, dimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengadakan perbaikan atau perubahan dalam masyarakat sebagai kelompok sasaran. Dalam proses implementasi menurut Smith ada empat variabel yang perlu di perhatikan, keempat variabel tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi dan berinteraksi secara timbal balik, oleh karena itu terjadi ketegangan-ketegangan yang bisa menyebabkan timbul protes protes, bahkan aksi fisik dimana hal ini menghendaki penegakan institusi- institusi baru untuk mewujudkan sasaran kebijakan tersebut. Keempat variabel dalam implementasi kebijakan publik tersebut, yaitu:

- a. Program (kebijakan) yang dilaksanakan.
- b. *Target groups*, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan.
- c. Unsur pelaksana (*implementor*), baik organisasi atau perorangan, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.
- d. Faktor lingkungan, unsur-unsur di dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan seperti aspek budaya, sosial, ekonomi dan politik.

Pengertian lain dari implementasi kebijakan adalah proses yang dilakukan dengan mudah (Fahmi, 2010). Namun implementasi kebijakan tidak hanya terbatas pada pelaksanaan program, melainkan jaringan kekuatan sosial-ekonomi dan politik yang mempengaruhi perilaku semua pemangku kepentingan sehingga menimbulkan dampak yang diharapkan maupun tidak diharapkan (Fahmi, 2010). Terdapat beberapa model terkait implementasi kebijakan yang berkaitan dengan kompleksitas permasalahan dan tujuan dari penelitian, antara lain:

a. Model Mazmanian dan Sabatier

Model implementasi kebijakan menurut model Mazmanian dan Sabatier terdiri dari 3 (tiga) variabel yaitu karakteristik masalah, struktur manajemen program yang terdapat pada peraturan yang mengoperasionalkan kebijakan, serta faktor-faktor diluar peraturan. Variabel yang mempengaruhi kebijakan antara lain kemudahan mengendalikan masalah, kemampuan pengambil kebijakan menstrukturkan proses implementasi, dan variabel diluar pengambil kebijakan yang berpengaruh terhadap proses implementasi.

b. Model Van Meter dan Van Horn

Kebijakan menurut model Van Meter dan Van Horn menuntut ketersediaan sumberdaya khususnya berupa anggaran, dengan asumsi kinerja kebijakan sejalan dengan pemenuhan kebutuhan anggaran terkait kebijakan tersebut. Dalam model ini standar dan sasaran yang jelas tidak menjamin keefektifan implementasi kebijakan apabila komunikasi antar pemangku kepentingan tidak berjalan dengan baik.

c. Model Grindle

Menurut Grindle, implementasi kebijakan tergantung pada isi kebijakan dan hal implementasinya dengan melihat tujuan, pelaksanaan tugas, serta kaitannya dengan lingkungan. Isi kebijakan meliputi pengaruh terhadap kepentingan, tipe manfaat, target derajat

perubahan, posisi pengambilan keputusan, pelaksana program, dan sumberdaya yang terlibat. Implementasi kebijakan dalam model ini terdiri dari 3 (tiga) hal yaitu:

- 1) Kekuasaan dan keterlibatan strategi pemangku kepentingan;
- 2) Karakteristik pemangku kepentingan;
- 3) Kepatuhan dan daya tanggap pemangku kepentingan.

4. Teori Hak Kepemilikan

Kata hak berasal dari Bahasa Arab, dimana di Indonesia dapat didefinisikan menjadi beberapa arti tanpa membedakan rincian makna dalam penggunaannya untuk menunjukkan kewenangan, kekuasaan, maupun kepunyaan atau kepemilikan (Pardede, 2019). Hak adalah istilah yang merujuk pada klaim atau keistimewaan yang dimiliki individu atau kelompok individu atas sesuatu, baik itu berupa kebebasan, kekuasaan, atau keuntungan tertentu. Hak dapat dipahami dalam berbagai konteks, termasuk dalam hukum, politik, etika, dan filsafat.

Hak kepemilikan atas sesuatu merupakan hak untuk mengakses, memanfaatkan, mengelola atas sesuatu, mengubah atau mentransfer sebagian atau seluruh hak atas sesuatu tersebut pada pihak lain. Terdapat 4 (empat) tipe hak kepemilikan (Hanna & Munasinghe, 1995), yaitu:

a. **Kepemilikan Privat**

Tipe kepemilikan privat ini dimiliki oleh individu dengan hak melekat berupa akses, pemanfaatan, dan kontrol, dengan kewajiban yaitu mencegah pemanfaatan yang merugikan sosial.

b. **Kepemilikan Bersama**

Kepemilikan bersama dimiliki secara kolektif, dimana pemilik memiliki hak untuk mengakses, memanfaatkan, dan mengontrol sebagaimana hak yang dipunyai dalam kepemilikan privat. Hak mengontrol tersebut biasanya berupa pengecualian pada bukan

pemilik. Kewajiban yang melekat pada pemilik adalah merawat dan mengatur tingkat pemanfaatan.

c. Kepemilikan Negara

Pada umumnya kepemilikan negara dimiliki oleh negara dengan mengatasnamakan seluruh warga negara. Hak negara berupa akses, pemanfaatan, dan kontrol berupa menentukan aturan, dengan kewajiban berupa menjaga suatu tujuan atau manfaat sosial.

d. Akses Terbuka (Non Kepemilikan)

Pada tipe akses terbuka tidak ada pemilik yang berarti terhadap hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh siapa saja tanpa ada kewajiban yang mengikat.

Dalam Undang-Undang Agraria menegaskan bahwa hak menguasai dari Negara memberikan kewenangan kepada negara untuk:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

5. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merujuk pada peningkatan dalam kemampuan suatu perekonomian untuk memproduksi barang dan jasa selama periode waktu tertentu. Ini sering diukur dengan menggunakan parameter seperti Produk Domestik Bruto (PDB), pendapatan nasional, atau output sektor-sektor ekonomi tertentu.

Pertumbuhan ekonomi adalah indikator keberhasilan kinerja ekonomi suatu negara atau wilayah (Ma'ruf & Wihastuti, 2008). Peningkatan dalam produksi barang dan jasa dapat berkontribusi pada peningkatan standar hidup, penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, dan kemajuan sosial dan ekonomi secara keseluruhan.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi meliputi investasi dalam infrastruktur, peningkatan produktivitas tenaga kerja, inovasi teknologi, stabilitas kebijakan, perdagangan internasional, dan faktor-faktor lainnya. Penting untuk memperhatikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan harus diimbangi dengan pertimbangan terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi tidak selalu merata di seluruh sektor ekonomi atau wilayah. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan distribusi hasil pertumbuhan ekonomi agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pada dasarnya teori pertumbuhan ekonomi terbagi menjadi teori pertumbuhan ekonomi historis, teori pertumbuhan ekonomi klasik dan teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Teori pertumbuhan ekonomi historis beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi harus dilihat dari masa prasejarah sampai dengan masa industri. Tokoh pada teori pertumbuhan ekonomi historis yaitu:

a. Werner Sombart

Werner Sombart membagi pertumbuhan ekonomi menjadi tiga tingkatan yaitu masa perekonomian tertutup, masa kerajinan dan pertukangan, serta masa kapitalis. Masa perekonomian tertutup memiliki ciri-ciri yaitu kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan sendiri, setiap individu sebagai produsen merangkap konsumen, dan belum terjadi pertukaran barang dan jasa. Ciri-ciri pada masa

kerajinan dan pertukangan yaitu adanya peningkatan kebutuhan manusia, terdapat pembagian tugas sesuai dengan keahlian, mulai terjadi pertukaran barang dan jasa, serta pertukaran belum didasari keuntungan sepihak. Masa kapitalis yang dimaksud oleh Sombart terbagi menjadi empat masa tingkatan.

Tingkatan pada masa kapitalis yaitu:

- 1) Tingkat prakapitalis, yang memiliki ciri-ciri yaitu kehidupan masyarakat masih statis dan bersifat kekeluargaan, masih bertumpu pada sektor pertanian, bekerja untuk memenuhi kebutuhan sendiri, serta hidup secara berkelompok.
- 2) Tingkat kapitalis, dengan ciri-ciri kehidupan masyarakat sudah dinamis namun masih individual, terdapat pembagian pekerjaan, dan terjadi pertukaran untuk mencari keuntungan.
- 3) Tingkat kapitalisme raya, yang mempunyai ciri-ciri munculnya kaum kapitalis yang memiliki alat produksi, usaha yang dilakukan semata-mata untuk mencari keuntungan, produksi dilakukan dengan alat modern secara massal, perdagangan mengarah pada ke persaingan monopoli, serta muncul dua kelompok dalam masyarakat yaitu majikan dan buruh.
- 4) Tingkat kapitalisme akhir, yang memiliki ciri-ciri yaitu munculnya aliran sosialisme, adanya campur tangan Pemerintah dalam ekonomi, dan mengutamakan kepentingan bersama.

b. Friedlich List

Terdapat empat tahap pertumbuhan ekonomi menurut List, yaitu masa berburu dan pengembaraan, masa beternak dan bertani, masa bertani dan kerajinan, serta masa kerajinan, industri, perdagangan.

c. Walt Whiteman Rostow

W.W.Rostow mengungkapkan teori pertumbuhan dibagi menjadi 5 (lima) sebagai berikut, yaitu: tahap masyarakat tradisional, tahap

prakondisi menuju lepas landas, tahap lepas landas, tahap dorongan menuju kematangan dan terakhir adalah tahap konsumsi massa tinggi.

Teori pertumbuhan ekonomi selanjutnya adalah teori pertumbuhan ekonomi klasik yang berpendapat bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan cara menekankan faktor-faktor produksi yang ada.

Tokoh-tokoh teori pertumbuhan ekonomi klasik yaitu:

- a. Adam Smith, dimana Smith berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi sebenarnya bertumpu pada adanya penambahan penduduk. Dengan adanya penambahan penduduk maka akan terdapat penambahan *output* atau hasil.
- b. David Ricardo, yang menyatakan pendapatnya bahwa faktor pertumbuhan penduduk yang semakin besar sampai menjadi dua kali lipat pada suatu saat akan menyebabkan jumlah tenaga kerja melimpah. Kelebihan tenaga kerja akan mengakibatkan upah menjadi turun. Upah tersebut hanya dapat digunakan untuk membiayai taraf hidup minimum sehingga perekonomian akan mengalami kemandegan (*statonary state*).
- c. Thomas Robert Malthus dengan pendapatnya bahwa jumlah penduduk yang berlebih dapat mengakibatkan kekurangan pangan dan kehidupan masyarakat stagnan. Faktor-faktor yang mempengaruhi teori tersebut yakni jumlah penduduk, teknologi, sumber daya alam, dan modal.

Terdapat beberapa tokoh dari teori pertumbuhan ekonomi neoklasik yang memiliki pendapat bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tidak hanya dengan menekankan faktor-faktor produksi saja, tetapi melihat segi penawaran pasar juga. Tokoh-tokoh teori pertumbuhan ekonomi klasik yaitu:

- a. Robert Solow, yang berpendapat bahwa penambahan penduduk harus dimanfaatkan sebagai sumber daya yang positif karena pertumbuhan ekonomi merupakan rangkaian kegiatan yang bersumber pada

manusia, akumulasi modal, pemakaian teknologi modern dan hasil atau output. Adapun pertumbuhan penduduk dapat berdampak positif dan dapat berdampak negatif.

- b. Harrod Domar, yang mempunyai asumsi bahwa modal harus dipakai secara efektif karena pembentukan modal sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Domar juga membahas mengenai tentang pendapatan nasional dan kesempatan kerja.
- c. Schumpeter, yang beranggapan bahwa faktor terpenting pertumbuhan ekonomi adalah kewirausahaan.

6. Teori Strategi

Strategi adalah rencana terarah atau serangkaian tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu dalam situasi yang kompleks atau berubah-ubah. Dalam konteks bisnis, pemerintahan, atau organisasi lainnya, strategi merupakan pendekatan yang dipilih untuk mengarahkan sumber daya dan energi agar dapat mencapai hasil yang diinginkan. Strategi juga didefinisikan sebagai sejumlah cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan (Fajriyah, 2018).

Beberapa pengertian strategi menurut para ahli dikemukakan oleh Freddy Rangkuti, Hamel dan Prahalad, serta Richard L. Daft. Rangkuti berpendapat strategi merupakan alat untuk mendapatkan tujuan. Pengertian strategi menurut Hamel dan Prahalad adalah tindakan yang bertahap dan berkelanjutan, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang yang diharapkan oleh pelanggan di masa depan. Richard L. Daft mendefinisikan strategi secara eksplisit berupa rencana tindakan yang menggambarkan alokasi sumber daya serta berbagai aktivitas untuk menghadapi lingkungan, mencapai tujuan organisasi, dan memperoleh keunggulan kompetitif (Fajriyah, 2018).

Dari ketiga definisi tersebut, kita dapat melihat bahwa strategi memiliki elemen-elemen umum seperti perencanaan, tindakan, alokasi sumber daya, dan pencapaian tujuan. Namun, cara pandang dan penekanan dari masing-masing ahli dapat berbeda-beda tergantung pada konteks dan pemahaman mereka tentang strategi dalam organisasi atau konteks bisnis yang berbeda

7. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Lahan pertanian terbagi menjadi dua yaitu lahan basah dan lahan kering. Lahan basah adalah lahan pertanian yang mengandung banyak air baik bersifat musiman maupun permanen, sementara lahan kering adalah lahan pertanian dengan air yang terbatas dan mengandalkan curah hujan untuk mempertahankan kesuburannya. Lahan pertanian basah pada umumnya diidentikkan dengan lahan sawah sedangkan lahan pertanian kering dijelaskan sebagai ladang, tegalan, kebun, pekarangan, kolam dan tambak.

Konsep berkelanjutan didefinisikan sebagai sebuah etik, serangkaian prinsip dan pandangan yang memiliki orientasi pada masa depan (Agustina, 2020) sedangkan pembangunan adalah sebuah proses perubahan kearah yang lebih baik (Rosana, 2018). Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan pembangunan berkelanjutan adalah sebuah paradigma dalam pembangunan yang berkaitan dengan keseimbangan dengan pilar-pilar berupa keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan sosial dan keberlanjutan lingkungan (Rivai dan Anugrah, 2011; Rosana, 2018; Suparmoko, 2020).

Pertanian berkelanjutan merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan yang menjadi prinsip dasar pembangunan pertanian (Rivai dan Anugrah, 2011). Pertanian berkelanjutan adalah pengelolaan sumberdaya untuk menghasilkan kebutuhan pokok manusia, yaitu sandang, pangan, dan papan, sekaligus mempertahankan dan

meningkatkan kualitas lingkungan dan melestarikannya (Iskandar et al., 2016). Pertanian berkelanjutan dapat menjadi alternatif sistem pertanian dalam menangani kendala petani miskin sumberdaya dan waktu, yang menjamin keberlanjutan lingkungan (Anwar, 2020). Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dalam undang-undang tersebut mengamanatkan daerah untuk menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan diartikan sebagai sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan. Untuk mengendalikan konversi lahan pertanian, melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, diharapkan dapat mendorong ketersediaan lahan pertanian untuk menjaga kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 bertujuan untuk:

- a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i. mewujudkan revitalisasi pertanian.

Terdapat beberapa peraturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, antara lain:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- f. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Kesesuaian Lahan pada Komoditas Tanaman Pangan;
- g. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 80/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Kriteria dan Tata Cara Penilaian Petani Berprestasi Tinggi pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- h. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Penetapan lahan sawah menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) perlu mempertimbangkan beberapa hal, sebagaimana diamanatkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 yaitu:

- a. luas kawasan pertanian pangan;
- b. produktivitas;
- c. potensi teknis lahan;

- d. keandalan infrastruktur; dan
- e. ketersediaan sarana dan prasarana pertanian.

Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan diartikan sebagai sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan. Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Indonesia pada umumnya hanya berdasarkan pendekatan sektoral dimana penentuan luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) didasarkan pada perhitungan data tabular. Pada akhirnya hasil dari Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berupa Peraturan Daerah tidak dapat langsung diimplementasikan pada wilayah lahan pertanian yang ada karena peraturan yang ada tidak menunjukkan lokasi lahan pertanian yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Hal ini bertentangan dengan maksud dari dibuatnya kebijakan tersebut. Alih fungsi lahan pertanian masih masif dan tidak terkontrol karena diakibatkan oleh pertumbuhan ekonomi dan penambahan penduduk suatu wilayah yang dapat dilihat dari peningkatan permintaan kebutuhan penggunaan lahan yang menyebabkan pertumbuhan aktivitas pemanfaatan sumberdaya alam serta adanya sektor pembangunan primer yang mengalami pergeseran dari sektor pertanian ke sektor manufaktur dan jasa (Handari, 2012).

Terkait penetapan lahan sawah menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan perlu memperhatikan beberapa hal antara lain jaringan irigasi. Jaringan irigasi adalah infrastruktur yang dibangun dengan tujuan untuk mengatur jalannya irigasi yang meliputi penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan pemanfaatannya berupa bangunan dan salurannya sebagai satu kesatuan. Jaringan irigasi terbagi menjadi jaringan irigasi utama dan jaringan irigasi tersier. Jaringan irigasi utama meliputi:

- a. Saluran primer membawa air dari bendung ke saluran sekunder dan ke petak-petak tersier yang diairi. Batas ujung saluran primer adalah pada bangunan bagi yang terakhir.
- b. Saluran sekunder membawa air dari saluran primer ke petak-petak tersier yang dilayani oleh saluran sekunder tersebut. Batas ujung saluran ini adalah pada bangunan sadap terakhir.
- c. Saluran pembawa membawa air irigasi dari sumber air lain (bukan sumber yang memberi air pada bangunan utama proyek) ke jaringan irigasi primer.
- d. Saluran muka tersier membawa air dari bangunan sadap tersier ke petak tersier yang terletak di seberang petak tersier lainnya. Saluran ini termasuk dalam wewenang dinas irigasi dan oleh sebab itu pemeliharaannya menjadi tanggung jawabnya.

Jaringan irigasi tersier meliputi:

- a. Saluran tersier membawa air dari bangunan sadap tersier di jaringan utama ke dalam petak tersier lalu ke saluran kuarter. Batas ujung saluran ini adalah boks bagi kuarter yang terakhir.
- b. Saluran kuarter membawa air dari boks bagi kuarter melalui bangunan sadap tersier atau parit sawah ke sawah-sawah.

Daerah irigasi adalah kesatuan wilayah atau hamparan sawah yang mendapatkan air dari satu jaringan irigasi.

Hal lain yang perlu menjadi pertimbangan dalam penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah pola tanam dimana merupakan bagian atau sub sistem dari sistem budidaya tanaman, sehingga dapat dikembangkan satu atau lebih sistem pola tanam dari sistem budidaya tanaman. Pola tanam ini diterapkan dengan tujuan memanfaatkan sumber daya secara optimal dan untuk menghindari resiko kegagalan. Pola tanam di daerah tropis, pada umumnya disusun dengan memperhatikan curah hujan, terutama pada daerah atau lahan yang sepenuhnya tergantung dari hujan.

8. Strategi Penerapan Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pada umumnya beberapa daerah di Indonesia masih menemui kesulitan dalam penerapan lahan pertanian pangan berkelanjutan di wilayahnya terkait tidak terdapatnya peta sebagai pedoman spasial dalam menentukan wilayah yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan. Kendala lain disamping ketersediaan pedoman spasial adalah ketidakjelasan kelanjutan dari status lahan pertanian yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan. Keuntungan maupun ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah kepada pemilik tanah terkait penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Hal ini menyebabkan pemilik lahan cenderung memilih untuk menjual lahan sawah yang dimiliki dibandingkan dengan mempertahankan sebagai lahan pertanian.

Dari 15 kabupaten dan kota yang terdapat di Provinsi Lampung baru terdapat beberapa daerah yang sudah membuat turunan dari Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Berikut adalah hasil inventarisasi wilayah di Provinsi Lampung yang sudah menerbitkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan:

Tabel 1. Hasil Inventarisasi Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Provinsi Lampung

No	Wilayah	Nomor Peraturan Daerah	Luas LP2B	Lampiran	
			Tercantum Pada Perda (Ha)	Peta	
				Ya	Tidak
1	Provinsi Lampung	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013	327.835		✓

Tabel 1. Lanjutan

2	Kabupaten Tulang Bawang Barat	Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2014	17.323	✓
3	Kabupaten Lampung Timur	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015	50.553	✓
4	Kabupaten Pringsewu	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015	8.145	✓
5	Kabupaten Tulang Bawang	Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016	31.800	✓
6	Kota Metro	Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016	1.567,5	✓
7	Kabupaten Lampung Selatan	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017	36.052	✓

Sumber: Analisis Peneliti, 2021

Dari data yang tersedia dapat dilihat bahwa baru beberapa daerah di Provinsi Lampung yang sudah mempunyai Peraturan Daerah mengenai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Hal ini menunjukkan masih belum maksimalnya komitmen pemerintah dalam menentukan lahan yang akan ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Pitaloka, 2020; Pramudita et al., 2015; Prasada dan Priyanto, 2019; Satria et al., 2018; Wicaksono, 2020).

Namun dengan menetapkan peraturan turunan berupa Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak langsung menyelesaikan permasalahan penentuan lahan pertanian yang akan ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan karena peraturan tersebut tidak melampirkan peta lahan pertanian yang

ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Perlunya peta untuk dimuat dalam lampiran Peraturan Daerah menjadi penting karena selain dapat menjadi acuan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, peta tersebut menjadi mempunyai kekuatan hukum karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah peraturan (Handari, 2012; Hatmanto dan Setyono, 2018; Mujiono dan Fitria, 2019; Pitaloka, 2020; Prasada dan Priyanto, 2019; Sakti et al., 2013; Wicaksono, 2020).

Strategi diperlukan dengan tujuan menyukseskan program prioritas. Memilih strategi yang tepat sangat penting dalam penerapan sebuah kebijakan. Strategi yang dipilih tentu saja perlu menyesuaikan kebijakan yang akan diterapkan. Dalam pengembangan strategi perlu menganalisis faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat penerapan kebijakan tersebut, termasuk kekuatan dan kelemahan yang dipunyai. Analisis strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Analisis penampalan peta (*overlay*)

Peta diartikan sebagai sebuah lembaran seluruh atau sebagian permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan memakai skala tertentu dimana suatu peta merupakan representasi dua dimensi dari suatu ruang tiga dimensi. Secara umum fungsi peta yaitu sebagai berikut:

- 1) Menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi.
- 2) Memperlihatkan ukuran (luas, jarak) dan arah suatu tempat di permukaan bumi.
- 3) Menggambarkan bentuk-bentuk di permukaan bumi, seperti benua, negara, gunung, sungai dan bentuk-bentuk lainnya.
- 4) Membantu peneliti sebelum melakukan survei untuk mengetahui kondisi daerah yang akan diteliti.
- 5) Menyajikan data tentang potensi suatu wilayah.
- 6) Sebagai alat analisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan.
- 7) Sebagai alat untuk menjelaskan rencana-rencana yang diajukan.

- 8) Sebagai alat untuk mempelajari hubungan timbal-balik antara fenomena-fenomena (gejala-gejala) geografi di permukaan bumi.

Terdapat beberapa tujuan pembuatan peta antara lain yaitu untuk menyimpan data yang ada di permukaan bumi, menganalisis data spasial, memberikan informasi baik dalam perencanaan tata kota dan permukiman serta ruang yang bersifat alami baik manusia maupun budaya.

Peta menjadi salah satu alat analisis yang dapat menggambarkan secara spasial suatu wilayah. Salah satu cara menganalisis dengan menggunakan peta adalah dengan penampalan peta (*overlay*). Penampalan peta atau yang juga disebut dengan *overlay* peta adalah proses penyatuan data atau peta dari lapisan layer yang berbeda sehingga overlay dapat didefinisikan sebagai operasi visual yang membutuhkan lebih dari satu layer untuk digabungkan secara fisik untuk menghasilkan peta sebagai hasil dari analisis. Pada umumnya analisis penampalan peta secara digital dilakukan melalui SIG (Sistem Informasi Geografis) dimana penampalan peta merupakan prosedur penting dalam analisis SIG.

b. Analisis *Strengths, Weakness, Opportunities, Threats* (SWOT)

Analisis SWOT merupakan metode analisis yang digunakan untuk memetakan kondisi internal dan eksternal untuk menghasilkan strategi dengan pertimbangan kondisi internal dan eksternal tersebut (Mahfud dan Mulyani, 2017; Siroj dan Lukmandono, 2021). Pada umumnya hasil analisis ini berupa rekomendasi untuk mempertahankan kekuatan (*strength*) dengan memanfaatkan peluang (*opportunity*) disamping mengurangi kelemahan (*weakness*) serta menghindari ancaman (*threat*) (Qanita, 2020).

c. *Analisis Quantitative Strategies Planning Matrix (QSPM)*

Analisis QSPM digunakan dalam menentukan strategi yang sudah dihasilkan melalui analisis SWOT (Mahfud dan Mulyani, 2017). Analisis ini dimaksudkan untuk dapat merumuskan strategi yang tepat sesuai dengan kondisi yang sudah dipetakan baik internal maupun eksternal (Siroj dan Lukmandono, 2021). Alternatif strategi pada tahap ini dianalisis berdasarkan hasil perumusan melalui pertimbangan faktor internal dan eksternal (Qanita, 2020).

Analisis dengan berdasarkan perpaduan faktor internal dan eksternal tersebut kemudian dilakukan pembobotan dengan penentuan nilai daya tarik atau *Attractiveness Scores (AS)* dan *Total Attractiveness Scores (TAS)* yang disesuaikan dengan bobot yang terdapat pada matriks IFAS-EFAS sebelumnya. Ketentuan pembobotan AS berlaku sebagai berikut (Qanita, 2020):

- 1) Nilai 1 = tidak menarik
- 2) Nilai 2 = agak menarik
- 3) Nilai 3 = cukup menarik
- 4) Nilai 4 = sangat menarik

Dimana nilai TAS didapatkan dengan pengalian bobot dengan nilai AS, yang kemudian *diakumulasikan* untuk mendapatkan nilai dari beberapa alternatif strategi. Analisis QSPM ini digunakan untuk dapat mendapatkan urutan prioritas strategi dalam sebuah alternatif (Qanita, 2020).

9. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai ‘Strategi Optimalisasi Implementasi Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Berbasis Spasial di Kabupaten Pringsewu’ merupakan penelitian yang berlokasi di Kabupaten Pringsewu dimana Kabupaten Pringsewu dijadikan salah satu wilayah di

Provinsi Lampung yang ditetapkan menjadi *mandatory* ketahanan pangan.

Salah satu cara mendapatkan informasi tambahan mengenai penelitian terkait strategi optimalisasi implementasi kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan berbasis spasial adalah dengan mencari referensi melalui penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu dapat dijadikan dasar atau acuan sekaligus bahan pertimbangan agar tidak terjadi pengulangan penelitian maupun tumpang tindih dengan penelitian terdahulu.

Penelitian mengenai implementasi kebijakan dan strategi terkait perlindungan maupun penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan sudah pernah dilakukan di beberapa daerah namun belum terdapat penelitian yang menentukan Kabupaten Pringsewu sebagai lokus penelitian. Beberapa penelitian terkait strategi optimalisasi implementasi kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan berbasis spasial dapat dilihat pada Tabel 3.

Perbedaan mendasar pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini menggabungkan beberapa metode penelitian sekaligus menjawab pertanyaan penelitian, yaitu menggunakan metode penampalan peta (*overlay*) dalam merumuskan pedoman spasial sebagai bahan pendukung dalam mengimplementasikan kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Penelitian ini juga menggunakan metode SWOT untuk dapat memetakan faktor-faktor, baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi strategi optimalisasi implementasi kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan berbasis spasial. Metode penelitian lain yang digunakan pada penelitian ini adalah QSPM dalam upaya menentukan strategi yang tepat dalam implementasi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Pringsewu.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor terkait permasalahan dalam implementasi kebijakan mengenai pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Penelitian terdahulu menggunakan metode deskriptif baik kuantitatif, kualitatif maupun metode campuran (*mixed-method*) dengan menggunakan analisis data sekunder, regresi, penampalan peta (*overlay*), korelasi *rank spearman*, skala likert, dan AHP yang kemudian didapatkan faktor-faktor terkait dengan permasalahan implementasi kebijakan pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Berdasarkan hasil inventarisasi penelitian terdahulu yang sudah dilakukan, hanya terdapat satu penelitian yang pada hasil penelitiannya secara spesifik menyebutkan strategi dalam penetapan kawasan pangan yang merupakan bagian dari rencana tata ruang kawasan di wilayah desa atau Kabupaten yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 untuk penyusunan strateginya.

Pada penelitian tersebut hanya dilakukan perumusan strategi dengan menggunakan analisis deskripsi sosiologis dimana tidak menyelesaikan permasalahan alih fungsi lahan pertanian secara spasial. Hasil penelitian tersebut berlaku umum karena tidak membedakan pemilik lahan sawah yang lahannya ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan pemilik lahan sawah yang lahannya tidak ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Beberapa temuan dari penelitian terdahulu terkait dengan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sebagaimana disebutkan dalam Tabel 2., antara lain adalah adanya kendala konsistensi kebijakan terkait dengan penetapan lahan sawah yang ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimana kendala terkait hal tersebut antara lain adalah kebijakan yang tidak memperbolehkan alih fungsi lahan tidak memperhatikan kebijakan pertumbuhan industri yang secara tidak langsung mendorong alih fungsi lahan sawah. Kendala lain terkait konsistensi kebijakan terlihat juga dengan pemberian izin lokasi pada

lahan sawah irigasi teknis untuk dialihkan menjadi lahan bukan pertanian.

Kendala lain terjadinya alih fungsi lahan sawah menjadi lahan bukan pertanian yang disebabkan oleh beberapa hal antara lain faktor ekonomi dengan asumsi apabila lahan dijual atau diusahakan menjadi bukan pertanian akan memberikan pendapatan yang lebih baik, selain itu alih fungsi juga terjadi akibat adanya pajak yang tinggi. Menyempitnya kepemilikan lahan akibat pembagian waris juga menjadi salah satu alasan terjadinya alih fungsi lahan sawah.

Temuan lain terkait kendala implementasi kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah diperlukannya dana yang cukup besar mulai dari identifikasi lokasi, penyusunan dokumen perencanaan sampai dengan terbitnya kebijakan tersebut. Kendala lain terkait dengan dana adalah belum adanya kejelasan terkait kontribusi maupun alokasi dana berupa pemberian insentif akibat penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Hal ini sejalan juga dengan salah satu temuan pada penelitian terdahulu yaitu belum adanya apresiasi Pemerintah dalam bentuk kebijakan terhadap aspirasi masyarakat dalam mempertahankan lahan pertanian. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan petunjuk teknis dalam kegiatan alih fungsi lahan sawah juga menjadi kendala yang diasumsikan berkaitan dengan kebijakan mengenai apresiasi Pemerintah kepada masyarakat yang mempertahankan lahan sawah tersebut.

Terdapat kendala lain terkait dengan identifikasi lokasi dan penyusunan dokumen perencanaan. Kendala tersebut adalah kurangnya kemampuan Pemerintah Daerah untuk melakukan pemetaan secara spasial sehingga data yang ada masih berupa data tabular yang menyebabkan sulitnya penyusunan dokumen perencanaan maupun kebijakan sehingga menjadi kendala implementasi kebijakan tersebut. Kendala berikutnya yaitu

koordinasi dan komunikasi yang didominasi oleh kepentingan Pemerintah sehingga tidak melibatkan petani sebagai pihak yang dikenai kebijakan. Hal ini mengindikasikan perlunya koordinasi dan kerjasama antarinstansi dalam implementasi perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pembeda penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah penelitian ini menggabungkan beberapa metode analisis yaitu metode penampalan peta (*overlay*), SWOT, dan QSPM dengan harapan strategi yang nantinya ditetapkan didasarkan pada kondisi spasial dan diharapkan dapat tepat sasaran.

Tabel 2. Penelitian tentang Implementasi Kebijakan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Strategi

No	Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan	Metode	Hasil Penelitian
1.	Lutfi Ibrahim Nasoetion (2003)	Konversi Lahan Pertanian: Aspek Hukum dan Implementasinya <i>Agricultural Land Conversion: Judicial Aspect and Its Implementation</i>	1. Mengetahui kendala kebijakan yang belum berjalan secara efektif; 2. Menemukan alternatif penyelesaian laju perubahan lahan pertanian	Deskriptif	1. Kendala mendasar peraturan sulit terlaksana: a. Kendala koordinasi kebijakan; b. Kendala pelaksanaan kebijakan; c. Kendala konsistensi perencanaan. 2. Pembuatan <i>zoning</i> sawah irigasi teknis dapat dijadikan sebagai alternatif penyelesaian yang efektif.
2.	M. Aniqul Fahmi (2010)	Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Klaten	1. Mengkaji penetapan kawasan pangan di Kabupaten Klaten yang merupakan bagian dari /	Deskriptif Sosiologis	1. Strategi Kabupaten Klaten dalam penetapan kawasan pangan yang merupakan bagian dari rencana tata ruang

Tabel 2. Lanjutan

No	Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan	Metode	Hasil Penelitian
		dalam Program Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan pada Kawasan Pangan	penetapan rencana tata ruang kawasan di wilayah Desa/Kabupaten sudah sesuai dengan UU No.41 Tahun 2009; 2. Mengkaji faktor-faktor yang menjadi kendala penetapan kawasan pangan sebagai lahan abadi dan solusi mengatasi kendala yang dihadapi.		kawasan di wilayah Desa atau Kabupaten sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 dilaksanakan dengan konsep bangun yang dipakai sebagai landasan dalam menyusun strategi pencegahan alih fungsi lahan berikut: a. Pengembangan tata ruang wilayah berbasis sosial- ekonomi-budaya dan ekosistem; b. Bentuk strategi pendekatan pengendalian alih fungsi lahan irigasi; c. Penetapan zonasi

Tabel 2. Lanjutan

No	Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan	Metode	Hasil Penelitian
					“permanen” kawasan lahan sawah beririgasi; dan d. Perda sebagai instrumen perlindungan hukum zonasi permanen kawasan lahan beririgasi. 3. Faktor yang menjadi kendala penetapan kawasan pangan sebagai lahan abadi: a. Faktor ekonomi (tingginya harga tanah); b. Perubahan perilaku petani yang enggan menggarap sawah; dan c. Lemahnya peraturan perundang-undangan 4. Solusi mengatasi faktor-faktor

Tabel 2. Lanjutan

No	Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan	Metode	Hasil Penelitian
					yang menjadi kendala penetapan kawasan pangan menjadi lahan abadi di Kabupaten Klaten dengan cara melakukan pengawasan dan pengelolaan lahan sawah dengan tepat.
3.	Rudy S. Rivai, Iwan S. Anugrah (2011)	Konsep dan Implementasi Pembangunan Pertanian Berkelanjutan di Indonesia <i>Concept and Implementation of Sustainable Agricultural</i>	1. Mengetahui konsep pembangunan pertanian berkelanjutan di Indonesia; 2. Mengetahui implementasi pembangunan pertanian berkelanjutan di Indonesia.	Deskriptif	1. Pembangunan pertanian berkelanjutan mengharuskan penerapan secara terpadu, lintas sektoral, dan lintas disiplin ilmu; 2. Masih terdapat ego sektoral yang menyebabkan pelaksanaan menjadi tasekat.

Tabel 2. Lanjutan

No	Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan	Metode	Hasil Penelitian
<i>Development in Indonesia</i>					
4.	MF. Anita Widhy Handari (2012)	Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Magelang	1. Mengkaji implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Magelang; 2. Mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Magelang; 3. Menentukan strategi dalam mencapai perlindungan lahan	Deskriptif- <i>Mixed method</i> (kuantitatif-kualitatif) (Regresi, AHP, dan analisis data sekunder)	1. Implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Magelang baru sampai pada proses identifikasi lahan; 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi adalah sosialisasi, petugas, dana, respon implementator, pemahaman terhadap kebijakan, peraturan pendukung, SOP, koordinasi antar instansi, tingkat pendidikan, usia, kepemilikan lahan, alasan konversi,

Tabel 2. Lanjutan

No	Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan	Metode	Hasil Penelitian
			pertanian berkelanjutan di Kabupaten Magelang.		dukungan publik, dan komitmen pelaksana menunjukkan hasil yang tidak signifikan karena implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 berlaku secara nasional;
					3. Alternatif strategi yang menjadi prioritas dalam perlindungan lahan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Magelang berdasarkan AHP adalah aspek ekologi.
5.	Sumarno (2012)	Konsep Pertanian Modern, Ekologis dan Berkelanjutan	1. Mengetahui permasalahan kecukupan produksi pangan; 2. Mengetahui konsep	Deskriptif	1. Diperlukan tindakan koreksi terhadap teknologi revolusi hijau untuk memperoleh sistem produksi padi yang

Tabel 2. Lanjutan

No	Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan	Metode	Hasil Penelitian
			pertanian ekologis-konservatif;		produktif-ekologis dan berkelanjutan;
			3. Mengetahui strategi pemenuhan kebutuhan bahan pangan yang aman konsumsi dan konservasi lingkungan untuk keberlanjutan produksi.		2. Konsep pertanian ekologis-konservatif telah tersedia namun rumusan operasional perlu disepakati pemangku kepentingan;
					3. Diperlukan diskusi nasional untuk pemahaman dan kesepakatan rumusan tindakan pemeliharaan mutu sumber daya lahan dan mutu lingkungan untuk menjaga keberlanjutan sistem produksi; Sistem sertifikasi produksi padi merupakan salah satu cara pengharusan

Tabel 2. Lanjutan

No	Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan	Metode	Hasil Penelitian
					penerapan pertanian ekologis-konservatif;
					4. Pertanian ekologis-konservatif untuk menjaga keberlanjutan produksi merupakan keharusan dalam sistem produksi dan ekonomi nasional.
6.	Melulosa Andhyta Sakti, Bambang H. Sunarminto, Azwar Maas, Didik Indradewa, Bambang D. Kertonegoro (2013)	Kajian Pemetaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Purworejo	1. Menentukan parameter untuk pemetaan LP2B dan LCP2B; 2. Menentukan karakteristik kriteria pengelompokan sebagai LP2B dan LCP2B; 3. Memetakan LP2B dan LCP2B di Kabupaten Purworejo.	Deskriptif - Kuantitatif (Pemetaan (overlay) dan analisis data sekunder)	1. Data dasar sebagai parameter utama analisis kebutuhan lahan untuk LP2B adalah laju jumlah penduduk, produksi, luas tanam, luas panen, produktivitas, resiko gagal panen, indeks pertanaman, alih fungsi lahan, dan kebutuhan bahan baku untuk agroindustri pangan.

Tabel 2. Lanjutan

No	Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan	Metode	Hasil Penelitian
					2. Kriteria utama pengelompokan lahan sawah sebagai LP2B adalah lahan sawah beririgasi teknis, produktivitas lebih dari 5.5 ton/hektare, indeks pertanaman lebih dari 1.75, serta merupakan daerah <i>lowland</i>, datar, dan drainase relatif lambat. 3. Total kawasan pertanian pangan untuk menjamin kelestarian kemandirian pangan di Kabupaten Purworejo adalah 38.562 hektare dengan LP2B basah 25.826 hektare, LP2B kering 5.243 hektare, LCP2B basah

Tabel 2. Lanjutan

No	Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan	Metode	Hasil Penelitian
					2.024 hektare, dan LCP2B kering 5.469 hektare.
7.	Danang Pramudita, Arya Hadi Dharmawan, Baba Barus (2015)	Kesesuaian Sosial Ekonomi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Kuningan	1. Mengidentifikasi karakteristik sosial ekonomi aktual pada kawasan program pelestarian tanah (LP2B) di Kabupaten Kuningan; 2. Mengidentifikasi persepsi petani terhadap LP2B; 3. Menganalisis kesesuaian sosial ekonomi di wilayah program LP2B.	Deskriptif - <i>Mixed method</i> (kuantitatif-kualitatif) (Statistik dan Skala Likert)	1. Berdasarkan tingkat konversi lahan, neraca pangan, ketimpangan pendapatan usahatani dan non usahatani, jumlah rumah tangga pertanian, jumlah tenaga kerja pertanian, status kepemilikan lahan, kelompok tani dan kebijakan RTRW terdapat perbedaan kesesuaian sosial ekonomi diantara tiga kecamatan yang dianalisis. 2. Dari kriteria persepsi, petani di lokasi penelitian mempunyai persepsi yang positif terhadap

Tabel 2. Lanjutan

No	Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan	Metode	Hasil Penelitian
					program LP2B (mendukung pelaksanaan program LP2B, merasa perlu ada upaya perlindungan terhadap lahan pertanian yang digarap petani, dan menganggap lahan pertanian yang sedang diusahakan sangat penting untuk mendukung penyediaan pangan dan sumber pendapatan keluarga). 3. Kecamatan Cibingbin mempunyai kesesuaian paling tinggi dari hasil sintesis kesesuaian lokasi berdasarkan kriteria sosial ekonomi.

Tabel 2. Lanjutan

No	Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan	Metode	Hasil Penelitian
8.	I. Iskandar, H. Miftah, A. Yusdiarti (2016)	Implementasi Program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Kabupaten Garut Jawa Barat (Kasus di Desa Jati Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut)	1. Mengidentifikasi perkembangan dan proses implementasi Program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Garut; 2. Mengetahui persepsi tingkat kepentingan petani terhadap atribut program PLP2B; 3. Mengetahui hubungan karakteristik petani dengan persepsi tingkat kepentingan petani terhadap atribut program PLP2B.	Deskriptif (analisis Korelasi <i>Rank Spearman</i>)	1. Implementasi Program LP2B berada pada tahap pendataan <i>by name by address</i> di Kabupaten Garut. 2. Persepsi tingkat kepentingan petani terhadap atribut program PLP2B baik.

Tabel 2. Lanjutan

No	Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan	Metode	Hasil Penelitian
9.	Dian Ayu Wulandari, Amni Zarkasyi Rahman (2017)	Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Tegal (Studi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032)	1. Mengetahui dan mendeskripsikan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Tegal; 2. Mengetahui dan mendeskripsikan tentang faktor-faktor yang mendorong dan menghambat implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian	Deskriptif – Kualitatif (observasi, wawancara, dan studi dokumentasi – teknik <i>purposive sampling</i>)	1. Implementasi LP2B sudah dilakukan sejak ditetapkan Perda RTRW Tahun 2012 namun belum berjalan dengan baik karena belum terbentuknya regulasi khusus mengatur LP2B. 2. Faktor pendorong adalah disposisi kebijakan sedangkan faktor penghambat adalah faktor komunikasi, faktor sumber daya, dan faktor struktur birokrasi.

Tabel 2. Lanjutan

No	Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan	Metode	Hasil Penelitian
10.	Oni Hidayati, Hermanto Siregar, A. Faroby Falatehan (2017)	Konversi Lahan Sawah di Kota Bogor dan Strategi Anggaran dalam Mengendalikannya	1. Mendeskripsikan konversi lahan sawah di Kota Bogor; 2. Menentukan strategi anggaran dalam mengendalikan konversi lahan sawah di Kota Bogor.	Deskriptif – Kuantitatif (Pemetaan (<i>overlay</i>) dan AHP)	1. Dari hasil <i>overlay</i> , pola konversi lahan sawah didominasi oleh permukiman dan ladang, perumahan dan ladang, serta perumahan dan kebun. Secara keseluruhan luas lahan sawah terkonversi dari tahun 2000 – 2015 sebesar 88.12% dengan pola konversi perumahan dan kebun. 2. Prioritas strategi anggaran perlindungan lahan pertanian sawah menurut AHP: a. anggaran sosialisasi lahan sawah; b. anggaran pembuatan perda LP2B;

Tabel 2. Lanjutan

No	Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan	Metode	Hasil Penelitian
					c. anggaran pengawasan; d. anggaran pembelian lahan sawah (land banking); e. sharing anggaran dengan Pemerintah Pusat/Provinsi; mengefektifkan peranan swasta; dan f. pemberian insentif kepada petani.
11.	Agung Pratama, M. Amin, Sandi Asmara, Bustomi Rosadi (2018)	Analisis Spasial Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Pesawaran	1. Mencari potensi luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Pesawaran; 2. Mencari potensi luas Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Deskriptif – Kuantitatif (Pemetaan <i>ArcGIS</i> 10.2 <i>(overlay)</i> dan analisis data sekunder)	1. Total potensi luas LP2B di Kabupaten Pesawaran sebesar 10.236,49 hektare. 2. LCP2B yaitu lahan kering yang telah dianalisis dengan mempertimbangkan kelas kelerengan diantara 0 – 8%.

Tabel 2. Lanjutan

No	Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan	Metode	Hasil Penelitian
(LCP2B) di Kabupaten Pesawaran.					
12.	Judo Satria, A. Faroby Falatehan, Irfan Syauqi Beik (2018)	Strategi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bogor	Merumuskan strategi Pemerintah Kabupaten Bogor melalui strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan.	Deskriptif – Kuantitatif (AHP dan analisis data sekunder)	1. Perlu langkah penguatan di wilayah lahan-lahan pertanian untuk penguatan pengembangan kawasan pertanian sebelum dialihfungsikan dan berubah penggunaan. 2. Berdasarkan AHP, konsep <i>Quadruple Helix</i> merupakan pilar utama yang mendorong perlindungan LP2B (pemerintah, swasta, akademisi, dan LSM/Yayasan).
13.	Mira Rosana (2018)	Kebijakan Pembangunan	1. Mengetahui hubungan pembangunan dengan	Deskriptif	1. Pembangunan memiliki hubungan erat dengan

Tabel 2. Lanjutan

No	Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan	Metode	Hasil Penelitian
		Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan di Indonesia	lingkungan di Indonesia; 2. Mengetahui pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Indonesia.		lingkungan. 2. Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang dilakukan guna meningkatkan mutu hidup generasi masa sekarang dan generasi masa yang akan datang.
14.	Tria Hatmanto, Jawoto Sih Setyono (2018)	Implementasi Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Melalui Penggunaan Peta Spasial Studi Kasus di Kabupaten	Mengkaji teknis pelaksanaan Perda LP2B di Kabupaten Temanggung yang telah dilengkapi dengan peta spasial.	Deskriptif (wawancara dan telaah dokumen)	Penggunaan peta spasial menjadi instrumen penting dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian dan didukung oleh kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam implementasi Perda LP2B di Kabupaten Temanggung.

Tabel 2. Lanjutan

No	Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan	Metode	Hasil Penelitian
15.	I Made Yoga Prasada, Moh. Wahyudi Priyanto (2019)	Temanggung, Provinsi Jawa Tengah Dampak Implementasi Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Provinsi Jawa Barat	Mengetahui dampak penerapan perda perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) terhadap luas konversi lahan sawah dan ketahanan pangan penduduk.	Deskriptif – Kuantitatif (Uji Wilcoxon dan analisis data sekunder)	Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan wujud semangat untuk mencegah dan mengendalikan laju alih fungsi lahan sawah di Jawa Barat namun belum dapat dijalankan karena terjadi ketidakefektifan pelaksanaan perda tersebut
16.	Mujiono, Indah Fitria (2019)	Model Spasial Perubahan Lahan Sawah untuk Mendukung	1. Mengetahui model spasial perubahan lahan sawah di Kabupaten Seluma antara tahun 2000-2010, 2010-	Deskriptif – Kuantitatif (ArcGIS 10.2, Envi 5.1,	1. Dalam kurun waktu 19 tahun Kabupaten Seluma kehilangan 2.410 hektare terutama di bagian selatan dengan

Tabel 2. Lanjutan

No	Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan	Metode	Hasil Penelitian
		Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Seluma	2019, dan 2000-2019; Membuat model spasial prediksi perubahan lahan sawah Kabupaten Seluma tahun 2032.	IDRISI Selva 17)	karakteristik fisik lereng 0 – 2% terutama ke lahan terbangun (permukiman). 2. Model spasial prediksi perubahan sawah hingga 2032 menunjukkan penambahan lahan sawah sebesar 557 hektare dan pengurangan lahan perkebunan seluas 4.156 hektare namun terdapat penambahan lahan terbuka seluas 3.274 hektare yang disebabkan kegiatan peremajaan (<i>replanting</i>) area perkebunan terutama sawit. 3. Perubahan lahan sawah mengakibatkan terganggunya

Tabel 2. Lanjutan

No	Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan	Metode	Hasil Penelitian
					ketersediaan dan stabilitas pangan karena beras tidak tergantikan oleh sawit dan karet, sehingga implementasi kebijakan dan penentuan lokasi LP2B layak untuk segera dilakukan sebagai upaya pengawasan terhadap ketersediaan lahan sawah.
17.	Arditya Wicaksono (2020)	Implementasi Program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Karawang: Studi Kasus Penetapan Luas Baku Sawah	Memetakan permasalahan dan kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam penetapan LP2B.	Deskriptif – Kualitatif (analisis data primer dan sekunder)	Kendala implementasi penetapan LP2B di Kabupaten Karawang: 1. Kurangnya komitmen pemerintah daerah dan tidak adanya kemampuan untuk melakukan analisa spasial. 2. Koordinasi dan komunikasi yang terjadi lebih didominasi

Tabel 2. Lanjutan

No	Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan	Metode	Hasil Penelitian
					oleh kepentingan pemerintah tidak melibatkan pihak yang akan dikenai kebijakan yakni petani.
					3. Belum adanya SOP pelaksanaan LP2B dari Kementerian Pertanian untuk mensosialisasikan perencanaan sampai penetapan LP2B kepada pihak yang tanahnya ditetapkan sebagai LP2B.
					4. Belum adanya kejelasan terkait besaran kontribusi dan alokasi dana untuk penetapan LP2B dari pemerintah terutama untuk pemberian insentif ke petani.

Tabel 2. Lanjutan

No	Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan	Metode	Hasil Penelitian
18.	Endang Dyah Ayu Pitaloka (2020)	Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Dimensi Politik Hukum Penataan Ruang	Menjelaskan konsep dan menganalisis implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Indonesia.	Deskriptif – Kualitatif (penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis serta pendekatan teknologi informasi)	1. Konsep perlindungan LP2B bertujuan mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan dilengkapi dengan unsur pemaksa berupa sanksi terhadap alihfungsi menjadi lahan non-pertanian, sekaligus terdapat insentif disinsentif bagi petani. Namun, kebijakan ini tidak dapat berdiri sendiri karena bergantung dari dukungan peraturan bidang penataan ruang. 2. Implementasi kebijakan yang dimuat dalam peraturan daerah mengenali rencana tata ruang

Tabel 2. Lanjutan

No	Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan	Metode	Hasil Penelitian
19.	Saeful Ali Anwar (2020)	Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Dinas Pertanian Kabupaten Bandung	Memperoleh gambaran mengenai Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Dinas Pertanian Kabupaten Bandung.	Deskriptif	masih sangat rendah terutama dipengaruhi faktor politik penguasa yang kurang peduli terhadap kebijakan LP2B. 1. Penyuluh pertanian tidak punya kewenangan dalam menerapkan sanksi menjadi hambatan dalam komunikasi. 2. Sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya fasilitasi/peralatan, serta sumber daya informasi dan kewenangan mempunyai peranan penting dalam implementasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Tabel 2. Lanjutan

No	Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan	Metode	Hasil Penelitian
					3. Sudah terdapat Peraturan Daerah maupun Peraturan Desa yang menandakan kesungguhan pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. 4. Struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Sumber: Analisis Peneliti, 2021

Berdasarkan penelitian terdahulu terlihat bahwa instrumen utama dalam mengendalikan alih fungsi lahan pertanian adalah Rencana Tata Ruang Wilayah, sehingga diperlukan pedoman spasial dalam implementasi kebijakan terkait perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (Fahmi, 2010; Handari, 2012; Hidayati et al., 2017; Nasoetion, 2003; Pratama et al., 2018; Sakti et al., 2013). Beberapa teori terkait strategi implementasi kebijakan pada penelitian terdahulu juga digunakan pada penelitian ini, antara lain adalah teori mengenai kebijakan (Fahmi, 2010; Handari, 2012; Iskandar et al., 2016; Nasoetion, 2003; Wulandari & Rahman, 2017), teori perencanaan tata ruang (Hatmanto & Setyono, 2018; Hidayati et al., 2017; Mujiono & Fitria, 2019; Nasoetion, 2003; Pratama et al., 2018; Satria et al., 2018), teori implementasi (Fahmi, 2010; Handari, 2012; Iskandar et al., 2016; Wicaksono, 2020; Wulandari & Rahman, 2017), dan teori pertanian pangan berkelanjutan (Fahmi, 2010; Iskandar et al., 2016; Pramudita et al., 2015; Rivai & Anugrah, 2011; Sumarno, 2012). Teori-teori tersebut digunakan pada penelitian ini dalam rangka mendapatkan strategi terkait pencegahan alih fungsi lahan pertanian.

Sebagaimana disebutkan pentingnya pedoman spasial maka dibutuhkan analisis menggunakan peta (Hatmanto & Setyono, 2018; Hidayati et al., 2017; Mujiono & Fitria, 2019; Pramudita et al., 2015; Pratama et al., 2018; Sakti et al., 2013; Satria et al., 2018; Wulandari & Rahman, 2017), dimana pada beberapa penelitian sebelumnya analisis peta dilakukan hanya menggunakan analisis deskriptif. Meskipun demikian terdapat penelitian sebelumnya yang sudah menggunakan aplikasi ArcGIS dalam analisis petanya (Hidayati et al., 2017; Mujiono & Fitria, 2019). Aplikasi analisis pemetaan menggunakan ArcGIS dengan cara menampalkan (overlay) beberapa peta yang dibutuhkan untuk mendapatkan lokasi sawah yang potensial untuk dijadikan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Pringsewu. Peta yang digunakan dalam analisis menggunakan ArcGIS adalah peta tutupan lahan atau peta guna

lahan, peta sarana dan prasarana pertanian berupa jaringan irigasi, peta sumber daya air, pola tanam, dan peta rencana tata guna lahan atau peta rencana pola ruang (Pratama et al., 2018; Sakti et al., 2013). Sementara variabel lain yang digunakan pada penelitian terdahulu dan digunakan juga pada penelitian ini adalah laju pertumbuhan penduduk (Sakti et al., 2013). Laju pertumbuhan penduduk digunakan sebagai alat analisis proyeksi kebutuhan akan tempat tinggal, dimana kebutuhan akan tempat tinggal berkaitan dengan besarnya kemungkinan terjadinya alih fungsi lahan pertanian. Pada penelitian ini kebutuhan akan tempat tinggal sudah terpetakan pada peta rencana pola ruang sebagaimana terdapat pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu Tahun 2023-2043.

Pertanian berkelanjutan adalah pertanian yang berkelanjutan secara lingkungan, ekonomi dan sosial (Rivai & Anugrah, 2011), untuk itu selain analisis menggunakan ArcGIS sebagai alat analisis keberlanjutan fisik maka digunakan juga analisis SWOT dan QSPM untuk menganalisis keberlanjutan ekonomi dan sosial pada penelitian ini. Variabel-variabel penelitian terdahulu yang digunakan pada penelitian ini antara lain adalah tingginya harga tanah, perubahan perilaku, hubungan pemilik dengan lahan (Fahmi, 2010), komunikasi, sumberdaya, hubungan antar organisasi, karakteristik kebijakan, disposisi implementasi (Handari, 2012), luas lahan pertanian (Fahmi, 2010; Pratama et al., 2018) dan realisasi anggaran (Hidayati et al., 2017; Pramudita et al., 2015; Sumarno, 2012).

Penelitian ini menggunakan analisis SWOT dan QSPM, berbeda dari penelitian sebelumnya yang menggunakan hasil uji Rank Spearman (Iskandar et al., 2016), analisis AHP (Hidayati et al., 2017; Satria et al., 2018), atau uji Wilcoxon (Prasada & Priyanto, 2019). Penggunaan analisis SWOT dan QSPM pada penelitian ini diharapkan tidak hanya menghasilkan strategi implementasi kebijakan lahan pertanian pangan

berkelanjutan, tetapi dapat mengoptimalkan implementasi strategi tersebut di Kabupaten Pringsewu.

B. Kerangka Pemikiran

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan salah satu upaya mendukung ketahanan pangan suatu wilayah. Kebijakan mengenai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi pedoman dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 11 Tahun 2021 mengamanatkan tersebutnya Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana tergambar juga dalam lampiran petanya dimana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan bagian dari Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Hal ini merupakan salah satu bentuk keseriusan Pemerintah dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian.

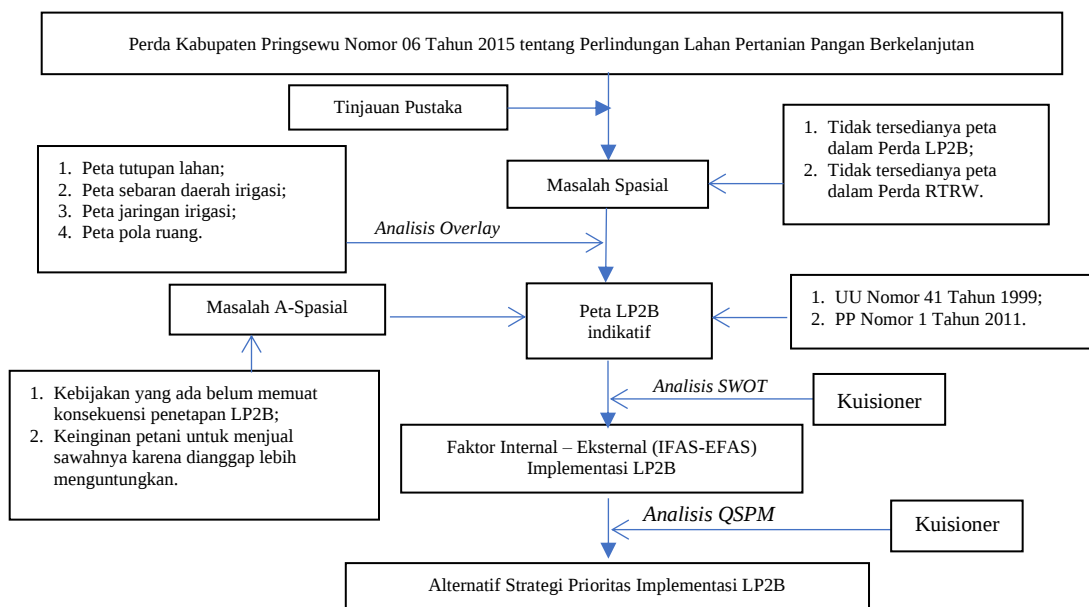
Pada hasil penelitian yang pernah dilakukan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kendala dalam implementasi kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi:

1. faktor fisik, antara lain:
 - a. tidak tersedianya peta kawasan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menyebabkan kebijakan menjadi sulit diimplementasikan;
 - b. perencanaan yang belum konsisten dan terintegrasi dimana Pemerintah berupaya melarang terjadinya alih fungsi namun disisi lain justru membuat kebijakan pertumbuhan industri/manufaktur dan sektor non pertanian lain yang secara tidak langsung mendorong alih fungsi lahan pertanian;
 - c. masih belum jelas strategi pemberlakuan insentif dan disinsentif dari penetapan lahan yang dijadikan lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui kebijakan yang ada;

- d. pemecahan lahan pertanian akibat waris akan menyebabkan menyempitnya kepemilikan lahan pertanian sehingga menjadi rawan alih fungsi;
 - e. ketersediaan air irigasi yang seringkali belum terjamin sehingga petani masih sering kekurangan air;
 - f. adanya inkonsistensi perencanaan antara RTRW yang seharusnya menjadi instrument utama pengendalian konversi lahan sawah beririgasi teknis melalui mekanisme pemberian izin lokasi justru merencanakan untuk mengkonversi lahan sawah beririgasi teknis menjadi lahan non pertanian;
 - g. kurangnya kemampuan Pemerintah berupa sumber daya manusia untuk melakukan pemetaan secara spasial lahan yang ditetapkan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan sehingga data yang ada masih berupa data tabular.
2. faktor sosial-ekonomi, yaitu:
- a. kondisi perekonomian pemilik lahan pertanian terkait dengan harga jual tanah yang tinggi menjadi alasan petani memilih untuk menjual dibandingkan menggarap sawah;
 - b. pertumbuhan penduduk yang tinggi membutuhkan lahan untuk permukiman menjadikan lahan pertanian sebagai alternatif untuk menjadi permukiman;
 - c. terjadinya konversi lahan pertanian karena pajak lahan yang tinggi;
 - d. adanya perubahan perilaku masyarakat yang kurang tertarik untuk memiliki profesi menjadi petani sehingga menjadi sulit untuk mempertahankan lahan pertanian;
 - e. luas lahan pertanian yang dimiliki seringkali menjadi standar penentuan status sosial seseorang di masyarakat sehingga apabila seseorang memiliki lahan pertanian yang luas akan meminimalisir terjadinya alih fungsi lahan pertanian, demikian pula sebaliknya apabila lahan pertanian yang dimiliki tidak luas maka akan lebih rentan terjadi alih fungsi;

- f. peraturan yang ada hanya berupa himbauan dan tidak dilengkapi dengan sanksi yang jelas;
- g. diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi dalam implementasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- h. belum adanya apresiasi Pemerintah terhadap apresiasi masyarakat yang berkontribusi dalam mempertahankan lahan pertanian berupa kejelasan alokasi dana pemberian insentif akibat penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- i. diperlukan SOP berupa petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dalam kegiatan alih fungsi lahan pertanian;
- j. koordinasi dan komunikasi didominasi oleh kepentingan Pemerintah sehingga masih tidak melibatkan petani sebagai pihak yang dikenai kebijakan.

Berdasarkan definisi variabel yang disebutkan dan dikuatkan dengan hasil penelitian sebelumnya dapat diidentifikasi permasalahan yang disusun dalam kerangka pemikiran dari penelitian mengenai strategi optimalisasi implementasi kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berbasis spasial di Kabupaten Pringsewu sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Berpikir Penelitian
Sumber: Analis Peneliti, 2022

Tabel 3. Alur Berpikir Penelitian

No	Tujuan Penelitian	Sumber Data	Alat Analisis	Output
1	Merumuskan pedoman spasial dengan menentukan luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan per kecamatan sesuai kondisi eksisting untuk mendukung kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam mengendalikan alih fungsi lahan pertanian	- Peta tutupan lahan tahun 2017 - Peta sebaran daerah irigasi - Peta jaringan irigasi - Peta pola ruang RTRW - Peta sebaran pola tanam	<i>ArcGIS</i> 10.8	- Peta lahan pertanian pangan berkelanjutan indikatif - Permasalahan implementasi kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan terkait spasial
2 a	Menentukan strategi prioritas dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Pringsewu.	- Peta lahan pertanian pangan berkelanjutan indikatif - Kuisioner	SWOT	- Faktor internal dan faktor eksternal (IFAS-EFAS) implementasi kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan
b		- Faktor internal dan faktor eksternal (IFAS-EFAS) implementasi kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan - Kuisioner	QSPM	- Strategi prioritas implementasi kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan

Sumber: Analis Peneliti, 2022

III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan metode gabungan (*mixed methods*), dimana metode tersebut merupakan metode dengan menggunakan gabungan dari dua atau lebih metode yang diambil dari dua pendekatan berbeda yaitu pendekatan kualitatif dan kuantitatif (Handari, 2012). Metode gabungan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif berupa deskripsi hasil peta analisis menggunakan metode analisis penampalan (*overlay*) peta dan pendekatan kuantitatif berupa analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap optimalisasi implementasi kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Pringsewu dengan menggunakan metode analisis SWOT dan QSPM. Penelitian ini mendeskripsikan fenomena belum terimplementasinya kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Pringsewu dimana Kabupaten Pringsewu sudah memiliki landasan hukum yang ditetapkan sejak tahun 2015. Pada penelitian ini analisis penampalan (*overlay*) peta digunakan untuk mengetahui sebaran sawah yang dapat ditetapkan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Pringsewu, sedangkan analisis SWOT dan QSPM digunakan untuk mendapatkan strategi implementasi kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Pringsewu. Penggabungan metode ini diharapkan strategi yang didapatkan dari hasil analisis lebih tepat sasaran sebagaimana lokasi persebaran lahan pertanian pangan berkelanjutan sehingga implemetasi kebijakan yang dibuat akan menjadi lebih optimal. Penelitian ini bersifat deduktif, yaitu penelitian yang berdasarkan teori atau hipotesis, dimana penelitian ini dilakukan berdasarkan teori. Prinsip deduksi adalah apa

saja yang dipandang benar pada semua peristiwa dalam suatu kelas atau jenis, berlaku juga sebagai hal yang benar pada semua peristiwa yang termasuk dalam kelas atau jenis itu (Hadi, 2004).

B. Konsep Dasar dan Batasan Operasional

Konsep dasar dan batasan operasional merupakan pengertian dan petunjuk mengenai variabel yang akan diteliti untuk mendapatkan dan menganalisis data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Berikut beberapa definisi operasional variabel dari penelitian mengenai strategi optimalisasi implementasi kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berbasis spasial di Kabupaten Pringsewu.

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun dengan cermat dan rinci. Kebijakan adalah langkah yang diambil dan ditetapkan oleh pemangku kepentingan yang mempunyai kewenangan dalam hal regulasi.

Implementasi kebijakan adalah cara yang dilakukan agar kebijakan yang sudah ditetapkan dapat mencapai tujuannya.

Lahan pertanian adalah salah satu dari sumber daya utama pada bidang pertanian, dimana lahan pertanian merupakan kawasan budidaya sebagaimana tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Pertanian berkelanjutan adalah pengelolaan sumberdaya untuk menghasilkan kebutuhan pokok manusia, yaitu sandang, pangan, dan papan, sekaligus mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan dan melestarikannya.

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Jaringan irigasi adalah saluran yang membawa air dari sumber air dengan tujuan untuk mengairi sawah. Daerah irigasi merupakan daerah atau wilayah yang dialiri atau mendapatkan air dari satu jaringan atau saluran irigasi dengan cara membendung sumber air.

Pola tanam adalah suatu urutan tanam termasuk masa pengelolaan tanah selama satu tahun.

Peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu melalui sebuah sistem proyeksi yang disajikan dalam berbagai cara yang berbeda, mulai dari peta konvensional yang tercetak hingga peta digital yang tampil di layar komputer.

Analisis penampalan peta (*overlay*) adalah suatu proses dalam Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk perolehan informasi baru dengan menumpuk atau menumpang-susunkan informasi dari dua peta atau dua data spasial atau lebih.

Matriks IFAS (*Internal Factor Analysis Summary*) adalah alat analisis yang menampilkan kondisi internal untuk menunjukkan faktor kekuatan dan kelemahan yang dimiliki.

Matriks EFAS (*External Factor Analysis Summary*) adalah alat analisis yang menampilkan kondisi eksternal yang dapat menunjukkan faktor peluang dan ancaman yang dimiliki.

Analisis SWOT (*Strenght Weakness Opportunity Threat*) adalah strategi analisis dengan metode penekanan melalui faktor internal dan eksternal dalam menyusun strategi perencanaan dalam penyelesaian masalah.

Analisis QSPM (*Quantitative Strategy Planning Matrix*) adalah analisis yang digunakan untuk menentukan strategi terbaik yang dipilih dari beberapa alternatif strategi yang diperoleh pada tahap analisis SWOT.

C. Lokasi, Responden, dan Waktu Penelitian

Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (*purposive*) yaitu di Kabupaten Pringsewu dengan pertimbangan Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu wilayah di Provinsi Lampung yang ditetapkan sebagai *mandatory* ketahanan pangan.

Responden dalam penelitian ini adalah perangkat daerah terkait pengambil kebijakan dan lembaga-lembaga penyedia data penunjang analisis implementasi kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan di lokasi penelitian.

Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode survei langsung ke lembaga-lembaga terkait untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam analisis. Selain itu, data didapatkan dengan metode *sampling* yang ditujukan pada petani yang diwakilkan oleh salah satu Kelompok Tani yang terdapat di Kabupaten Pringsewu. Responden dipilih berdasarkan tujuan atau informasi yang ingin didapat, artinya tujuan informasi yang ingin didapat akan menentukan responden yang tepat dan kompeten untuk memberikan informasi yang dibutuhkan. Jumlah responden tergantung dari informasi yang diperlukan. Jadi pengumpulan sampel tidak tergantung dari jumlahnya, tetapi didasari dari kualitas informasi dari tiap-tiap responden yang dirasa relevan terhadap domain penelitian.

Penentuan responden dilakukan secara sengaja berdasarkan metode *purposive sampling* sebanyak 7 (tujuh) orang yang dianggap mewakili untuk dapat menjawab kebutuhan data yang diperlukan. Penentuan responden ini didasarkan pada penelitian terdahulu dimana terdapat dasar pertimbangan pakar yaitu keberadaan atau keterjangkauan, serta reputasi dan kredibilitas.

Jumlah pakar sebanyak 1-2 orang dianggap terlalu sedikit, sedangkan jumlah pakar lebih dari 10 orang dianggap terlalu banyak dapat menimbulkan ambigu (Hora, 2004). Jumlah pakar sebanyak 3 (tiga) sampai 6 (enam) atau 7 (tujuh) orang dianggap cukup dan memiliki presisi yang tinggi. Responden yang ditentukan terdiri dari instansi Pemerintah dan pengelola lahan pertanian, dengan memenuhi minimal 2 (dua) dari kriteria berikut:

1. Responden merupakan pengguna atau pemilik lahan pertanian;
2. Responden memiliki aktivitas terkait penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
3. Responden memiliki kompetensi terkait kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
4. Responden merupakan pengambil kebijakan dengan masa jabatan minimal 1 tahun.

Dari kriteria tersebut di atas, dapat disimpulkan jumlah responden sebanyak 7 (tujuh) orang dimana 5 (lima) orang responden berasal dari instansi terkait yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu sebanyak 1 (satu) orang, Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu sebanyak 2 (dua) orang, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pringsewu sebanyak 2 (dua) orang. Selain instansi terkait, terdapat 2 (dua) orang responden yang memiliki aktivitas dan kompetensi terkait lahan pertanian pangan berkelanjutan yaitu perwakilan Kelompok Tani yang terdapat di Kabupaten Pringsewu sebanyak 1 (satu) orang dan akademisi sebanyak 1 (satu) orang. Data responden dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Data Responden Penelitian

No	Nama Responden	Instansi	Pekerjaan
1	Akhmad Fadoli, M.Si	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu	Kepala Badan
2	M. Maryanto, S.P.	Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu	Sekretaris Dinas

Tabel 4. Lanjutan

3	Sri Ermalia, S.P.	Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
4	Wiyanto, S.T., M.T.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pringsewu	Kepala Bidang Sumber Daya Air
5	Anjarwati Setyaningrum, S.T, M.T.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pringsewu	Kepala Bidang Penataan Ruang
6	Anwar Tsani	Kelompok Tani Pelita Jaya Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu	Kelompok Tani
7	Dr. Ir. Citra Persada, M.Sc	Universitas Lampung	Dosen Magister Perencanaan Wilayah dan Kota

Pengumpulan data ini dilakukan pada bulan November 2022 sampai Januari 2023.

D. Jenis dan Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari literatur dan aturan teknis dan yuridis. Data sekunder diperoleh dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pertanian, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta dikuatkan dengan data primer yang didapatkan dari wawancara dengan Pemerintah selaku pengambil kebijakan berupa data spasial maupun tabular, serta petani selaku obyek terdampak langsung kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Data tersebut nantinya akan dilakukan penyatuan data

spasial dari lapisan layer yang berbeda (*overlay*) yang kemudian dikuatkan dengan hasil analisis data tabular yang ada untuk mendapatkan hasil analisis yang diinginkan. Data dimaksud merupakan data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini dan dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Jenis Kebutuhan dan Sumber Data

No.	Jenis Data	Sumber Data
1	Data luas sawah/penggunaan lahan	BPS
2	Peta tutupan lahan	Bappeda
3	Peta rencana pola ruang	Bappeda
4	Data pola tanam	Dinas Pertanian
5	Peta sebaran pola tanam	Dinas Pertanian
6	Data daerah irigasi	Dinas PUPR
7	Peta sebaran daerah irigasi	Dinas PUPR
8	Peta jaringan irigasi	Dinas PUPR

Sumber: Analisis Peneliti, 2023

E. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif gabungan (*mixed methods*). Metode gabungan yang digunakan adalah metode kualitatif-kuantitatif. Metode kualitatif digunakan untuk menjelaskan gambaran yang kompleks dan menyeluruh, dengan deskripsi yang bersifat menceritakan dan menjelaskan pandangan-pandangan rinci dari informan, dilakukan dalam *setting* yang alami, eksplorasi dan interpretasi, cenderung untuk membangun teori, berorientasi pada proses dibandingkan hasil, dimana variabel-variabelnya belum diketahui, dan petunjuk yang ada bersifat fleksibel. Dengan kata lain metode tersebut tidak hanya menjelaskan variabel saja namun menjelaskan dengan menganalisis variabel-variabel yang ada sehingga rencana penelitian dapat selalu berkembang, tergantung pada konteks dan pribadi penelitian yang harus terlibat secara langsung. Data

tabular yang didapatkan kemudian dianalisis secara kuantitatif dengan perhitungan matematis menggunakan Microsoft Excel. Berikut analisis data yang digunakan dalam penelitian:

1. Analisis data untuk menjawab tujuan pertama

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui analisis data tabular dan analisis penampalan peta (*overlay*) untuk menjawab tujuan pertama penelitian. Analisis tersebut digunakan untuk menggambarkan kondisi eksisting dan kecenderungan perkembangan wilayah sehingga terumuskan pedoman spasial dalam rangka mendukung strategi optimalisasi implementasi kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan berbasis spasial.

- a. Analisis data tabular

Analisis data tabular ditujukan untuk mengetahui dan mendefinisikan peringkat data yang diinginkan untuk dianalisis. Data tabular berupa data sekunder yang terdiri dari luas kawasan pertanian pangan. Data luasan lahan pertanian per tahun per kecamatan diperlukan untuk melihat tren perubahan lahan pertanian menjadi lahan non pertanian selama 10 tahun terakhir yang didapatkan dari BPS Kabupaten Pringsewu.

- b. Analisis penampalan peta (*overlay*)

Analisis penampalan peta (*overlay*) digunakan untuk menentukan wilayah yang potensial untuk ditetapkan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan menampalkan peta (*overlay*):

- 1) peta luasan kawasan pertanian pangan;

Luas kawasan pertanian pangan diperlukan untuk melihat kondisi saat ini (eksisting) sebaran lahan pertanian yang terdapat di Kabupaten Pringsewu, data tersebut didapatkan dari Bappeda Kabupaten Pringsewu berupa peta tutupan lahan Kabupaten Pringsewu. Peta lain yang dibutuhkan terkait kebutuhan informasi luas kawasan pertanian pangan adalah peta rencana pola ruang

Kabupaten Pringsewu yang terdapat pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pringsewu Tahun 2011-2031 dan Materi Teknis pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pringsewu Tahun 2022-2042 yang juga didapatkan dari Bappeda Kabupaten Pringsewu.

2) peta sebaran daerah irigasi

Daerah irigasi diidentifikasi melalui peta untuk melihat luasan sawah yang teraliri oleh aliran irigasi dan sebarannya di masing-masing kecamatan.

3) peta jaringan irigasi

Peta jaringan irigasi menggambarkan jaringan atau saluran irigasi teknis yang sudah terbangun di Kabupaten Pringsewu berdasarkan kewenangannya baik jaringan irigasi primer, sekunder maupun tersier.

2. Analisis data untuk menjawab tujuan kedua

Metode analisis yang digunakan untuk menjawab tujuan kedua penelitian ini adalah analisis SWOT dan analisis QSPM. Analisis tersebut digunakan untuk dapat melihat kondisi yang ada pada penelitian untuk dapat dikelompokkan sesuai dengan kelebihan dan kekurangannya baik internal maupun eksternal agar dapat dirumuskan strategi yang sesuai dengan harapan penelitian. Untuk dapat melakukan analisis SWOT diperlukan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal melalui analisis IFAS-EFAS yang kemudian dipetakan dalam matriks SWOT.

a. Analisis IFAS-EFAS

Analisis IFAS-EFAS dilakukan dengan menggunakan matriks dari hasil pengelompokkan faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta faktor eksternal berupa peluang dan ancaman dari penelitian yang dilakukan.

Matriks analisis IFAS-EFAS menggunakan skor pembobotan dengan ketentuan sebagai berikut (Qanita, 2020):

- 1) Sel I, II, dan IV atau disebut juga sebagai tumbuh dan bina (*growth and built*). Strategi intensif meliputi penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk atau strategi integrasi meliputi integrasi ke depan, integrasi ke belakang dan integrasi horizontal.
- 2) Sel III, V, dan VII atau disebut juga sebagai pertahankan dan pelihara (*hold and maintain*). Strategi yang digunakan yaitu penetrasi pasar dan pengembangan produk.
- 3) Sel VI, VIII, dan IX atau disebut juga sebagai panen dan divestasi (*harvest and divestiture*). Strategi yang dilakukan berupa pengurangan atau pengecilan usaha.

b. Analisis SWOT

Analisis SWOT dalam penelitian ini dilakukan untuk melihat kekuatan – kelemahan – peluang – gangguan (*strength-weakness-opportunity-threat*) yang terdapat pada strategi optimalisasi implementasi kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan berbasis spasial di Kabupaten Pringsewu dan menentukan strategi untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut berupa penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui penentuan faktor internal dan eksternal untuk memetakan kekuatan – kelemahan – peluang – gangguan.

Faktor-faktor yang sudah dikelompokkan dalam kekuatan – kelemahan – peluang – gangguan kemudian diberikan bobot pada masing-masing faktor dengan skala tidak penting sampai dengan penting (0 sampai dengan 100) berdasarkan pengaruh komponen faktor tersebut terhadap implementasi kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan jumlah keseluruhan bobot harus 100% atau berjumlah 1 (satu). Selanjutnya pada masing-masing faktor

dilakukan penghitungan rating dengan pemberian skala antara 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) sesuai dengan pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap optimalisasi implementasi kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Pemberian skala dilihat kecenderungan pada tingkat kepositifannya sehingga faktor dalam kategori kekuatan dan peluang diberikan nilai terbesar 4 dengan indikator memberikan pengaruh baik, namun faktor dalam kategori ancaman dan gangguan sebaliknya.

Diagram kuadran analisis SWOT terbagi menjadi 4 (empat) formulasi sebagaimana dapat terlihat pada Tabel 11. yaitu (Astuti & Ratnawati, 2020; Lestari et al., 2021; Sari, 2020):

- 1) Kuadran S-O dimana kuadran yang dimaksud memaksimalkan kekuatan secara agresif memperluas basis operasi dengan prioritas strategi yaitu integral horizontal, diversifikasi konsentrik, usaha patungan;
- 2) Kuadran S-T dimana kuadran yang dimaksud mengubah arah sumber daya dari satu aktivitas bisnis internal ke ruang lain dengan prioritas strategi yaitu pertumbuhan terkonsentrasi, pengembangan pasar, pengembangan, inovasi;
- 3) Kuadran W-O dimana kuadran yang dimaksud mengikatkan diri pada satu bidang usaha dengan prioritas strategi yaitu integrasi vertikal, diversifikasi konglomerat; dan
- 4) Kuadran W-T dimana kuadran tersebut memfokuskan pada perubahan dan kelangsungan hidup yang merupakan kemampuan meraih bagian pasar yang besar untuk kemungkinan skala ekonomi dengan prioritas strategi yaitu benah diri, divestasi, likuidasi.

Pengisian nilai pada Tabel 6. dan Tabel 7. dilakukan melalui kuisioner oleh responden dengan cara melihat keterkaitan antarfaktor. Pengisian nilai berdasarkan kekuatan antar faktor

dengan nilai 0 (nol) yang berarti tidak ada keterkaitan, nilai 1 (satu) berarti mempunyai keterkaitan lemah, dan nilai 2 (dua) yang artinya keterkaitan kuat.

Tabel 6. Pembobotan IFAS

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	Total	Bobot
A														
B														
C														
D														
E														
F														
G														
H														
I														
J														
K														
L														

Sumber: Siroj dan Lukmandono, 2021; Analisis Peneliti, 2023

Tabel 7. Pembobotan EFAS

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Total	Bobot
A											
B											
C											
D											
E											
F											
G											
H											
I											

Sumber: Siroj dan Lukmandono, 2021; Analisis Peneliti, 2023

Tabel 8. Analisis IFAS

No	Faktor Internal	Bobot	Rating	Skor
Kekuatan (<i>Strenght</i>)				
1	Wilayah yang strategis mempermudah akses pembangunan infrastruktur penunjang pertanian dan distribusi pupuk			
2	Sudah ada komitmen dari Pemda untuk mempertahankan LP2B melalui Perda PLP2B			
3	Mayoritas kepemilikan lahan merupakan masyarakat Pringsewu sehingga akan mempermudah Pemda untuk melakukan sosialisasi Perda			
4	Sudah terjalin koordinasi antar Dinas yang berkewenangan terkait dengan LP2B			
Kelemahan (<i>Weakness</i>)				
1	Masih terdapat lahan sawah yang belum terdukung infrastruktur irigasi			
2	Masih belum terpenuhinya kebutuhan air irigasi yang terlihat dari mayoritas pola tanam yang hanya sekali tanam			
3	Belum terdapat peta lokasi yang menunjukkan lahan sawah yang ditetapkan menjadi LP2B pada Perda PLP2B			
4	Perencanaan yang belum terintegrasi dimana dalam RTRW tidak menyebutkan luasan maupun peta LP2B			
5	Perda PLP2B belum tersosialisasikan optimal kepada masyarakat karena tidak terdapat pedoman spasial di dalam Perda tersebut			

Tabel 8. Lanjutan

No	Faktor Internal	Bobot	Rating	Skor
6	Terjadinya konversi lahan sawah akibat pajak yang tinggi			
7	Keterbatasan anggaran Pemda untuk pemberian kompensasi pada lahan yang ditetapkan menjadi LP2B			
8	Kurangnya SDM Pemda yang memiliki kemampuan untuk melakukan pemetaan LP2B secara spasial			

Sumber: Siroj dan Lukmandono, 2021; Analisis Peneliti, 2023

Tabel 9. Analisis EFAS

No	Faktor Eksternal	Bobot	Rating	Skor
<i>Peluang (Opportunity)</i>				
1	Terdapat program bantuan benih sebagai upaya mempertahankan lahan sawah			
2	Terdapat Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) untuk petani			
3	Asumsi masyarakat dalam penentuan status sosial berdasarkan luas lahan sawah yang dimiliki			
<i>Ancaman (Threat)</i>				
1	Belum terdapat petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) strategi pemberlakuan insentif-disinsentif pelaksanaan PLP2B dari Kementerian			
2	Tingginya pertumbuhan penduduk sehingga membutuhkan lahan untuk tempat tinggal			

Tabel 9. Lanjutan

No	Faktor Eksternal	Bobot	Rating	Skor
3	Terdapat perilaku petani yang enggan menggarap sawah			
4	Posisi sawah yang strategis dekat dengan kegiatan perdagangan dan jasa yang dianggap lebih menguntungkan menjadikan lahan sawah rentan alih fungsi			
5	Pemecahan lahan sawah karena waris menyebabkan menyempitnya kepemilikan lahan sawah sehingga rawan alih fungsi			
6	Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya LP2B			

Sumber: Siroj dan Lukmandono, 2021; Analisis Peneliti, 2023

Nilai bobot pada Tabel 8. dan Tabel 9. ditentukan dari nilai rata-rata jumlah bobot masing-masing responden. Hasil skor berdasarkan keterkaitan antarfaktor oleh responden, kemudian dihitung rata-rata nilai bobot masing-masing faktor pada masing-masing responden. Selanjutnya hasil bobot pada masing-masing faktor dijumlahkan dan kemudian ditara-rata sesuai dengan jumlah responden. Hasil dari rata-rata tersebut yang kemudian dimasukkan pada kolom bobot di tabel analisis IFAS maupun tabel analisis EFAS. Selanjutnya kolom rating diisi dengan pemberian nilai skala antara 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) sesuai dengan pengaruh terhadap hasil penelitian ini. Nilai pada kolom skor yang terdapat pada Tabel 8. dan Tabel 9. didapatkan dari perkalian nilai yang terdapat pada kolom bobot dengan nilai yang terdapat pada kolom rating. Nilai tertinggi pada nilai akhir pada kolom skor menunjukkan tingkat faktor yang paling

berpengaruh sebaliknya nilai terendah menunjukkan faktor yang paling kurang berpengaruh terhadap penelitian.

Pada penelitian ini dapat diidentifikasi 21 faktor yang terdiri dari 12 faktor internal dan 9 faktor eksternal. 12 faktor internal tersebut terdiri dari 4 faktor kekuatan dan 8 faktor kelemahan, sedangkan 9 faktor eksternal terdiri dari 3 faktor peluang dan 6 faktor ancaman.

Tabel 10. Matriks *Grand Strategy* Analisis Kuadran SWOT

		S (Kekuatan Inti Internal)	
T (Ancaman Eksternal Utama)	(Kuadran II) Mendukung strategi yang berorientasi pada perubahan	(Kuadran I) Mendukung strategi yang agresif	O (Sejumlah Peluang Eksternal)
	(Kuadran III) Mendukung strategi yang defensif	(Kuadran IV) Mendukung strategi yang diversifikasi	
		W (Kelemahan Kritis Internal)	

Sumber: Sari, 2020; Lestari et al., 2021

Tabel 11. Analisis SWOT

EFAS IFAS		Kekuatan (S)	Kelemahaan (W)
		1. Wilayah yang strategis mempermudah akses pembangunan infrastruktur penunjang pertanian dan distribusi pupuk 2. Sudah ada komitmen dari Pemda untuk mempertahankan LP2B melalui Perda PLP2B 3. Mayoritas kepemilikan lahan merupakan masyarakat Pringsewu sehingga akan mempermudah Pemda untuk melakukan sosialisasi Perda 4. Sudah terjalin koordinasi antar Dinas yang berkewenangan terkait dengan LP2B	1. Masih terdapat lahan sawah yang belum terdukung infrastruktur irigasi 2. Masih belum terpenuhinya kebutuhan air irigasi yang terlihat dari mayoritas pola tanam yang hanya sekali tanam 3. Belum terdapat peta lokasi yang menunjukkan lahan sawah yang ditetapkan menjadi LP2B pada Perda PLP2B 4. Perencanaan yang belum terintegrasi dimana dalam RTRW tidak menyebutkan luasan maupun peta LP2B 5. Perda PLP2B belum tersosialisasikan optimal kepada masyarakat karena tidak terdapat pedoman spasial di dalam Perda tersebut 6. Terjadinya konversi lahan sawah akibat pajak yang tinggi 7. Keterbatasan anggaran Pemda untuk pemberian kompensasi pada lahan yang ditetapkan menjadi LP2B 8. Kurangnya SDM Pemda yang memiliki kemampuan untuk melakukan pemetaan LP2B secara spasial
Peluang (O)		Strategi S-O	Strategi W-O
1. Terdapat program bantuan benih sebagai upaya mempertahankan lahan sawah 2. Terdapat Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) untuk petani 3. Asumsi masyarakat dalam penentuan status sosial berdasarkan luas lahan sawah yang dimiliki		Menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Mengatasi kelemahan untuk memanfaatkan peluang
Ancaman (T)		Strategi S-T	Strategi W-T
1. Belum terdapat petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) strategi pemberlakuan insentif-disinsentif pelaksanaan PLP2B dari Kementerian 2. Tingginya pertumbuhan penduduk sehingga membutuhkan lahan untuk tempat tinggal 3. Terdapat perilaku petani yang enggan menggarap sawah 4. Posisi sawah yang strategis dekat dengan kegiatan perdagangan dan jasa yang dianggap lebih menguntungkan menjadikan lahan sawah rentan alih fungsi 5. Pemecahan lahan sawah karena waris menyebabkan menyempitnya kepemilikan lahan sawah sehingga rawan alih fungsi 6. Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya LP2B		Menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman	Meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Sumber: Qanita, 2020; Analisis Peneliti, 2023

c. *Analisis Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM)*

Analisis QSPM pada penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memetakan strategi yang dihasilkan dari analisis SWOT dalam rangka strategi optimalisasi implementasi kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan berbasis spasial di Kabupaten Pringsewu.

Analisis QSPM dilakukan dengan menggabungkan faktor internal dan faktor eksternal dengan bobot numerik dengan harapan dapat membantu untuk memprioritaskan dan memilih strategi yang paling sesuai yang sebelumnya sudah dianalisis dari SWOT.

Analisis QSPM dilakukan dengan tahapan sebagai berikut (Qanita, 2020; Siroj dan Lukmandono, 2021):

- 1) Menyusun daftar faktor-faktor utama berupa faktor internal dan faktor eksternal.
- 2) Menyusun bobot dari tiap-tiap faktor baik internal maupun eksternal sebagaimana terdapat pada Matriks IFAS-EFAS.
- 3) Menentukan strategi alternatif yang sudah dirumuskan pada Matriks SWOT.
- 4) Melakukan pembobotan *Attractiveness Score (AS)* atau nilai daya tarik dengan mengidentifikasi angka yang menunjukkan daya tarik relatif masing-masing strategi dengan dengan mempertimbangkan faktor tertentu. Penilaian AS didasarkan pada:
 - Nilai 1 = tidak menarik
 - Nilai 2 = agak menarik
 - Nilai 3 = cukup menarik
 - Nilai 4 = sangat menarik
- 5) Melakukan perhitungan *Total Attractiveness Score (TAS)* atau total nilai daya tarik dengan cara mengalikan nilai yang terdapat pada kolom bobot dengan kolom AS pada masing-masing strategi

dimana strategi dianggap menarik apabila nilai TAS semakin tinggi.

Tabel 12. Analisis QSPM

Faktor Internal dan Faktor Eksternal	Bobot	Strategi 1		Strategi 2		Strategi 3	
		AS	TAS	AS	TAS	AS	TAS
1. Kekuatan (<i>Strenght</i>)							
2. Kelemahan (<i>Weakness</i>)							
3. Peluang (<i>Opportunity</i>)							
4. Gangguan (<i>Threat</i>)							

Sumber: Qanita, 2020

Setelah kelima tahapan analisis QSPM dilakukan dapat terlihat skor dari masing-masing strategi pada masing-masing faktor baik faktor internal maupun faktor eksternal. Untuk selanjutnya dapat dilihat strategi dengan skor yang paling tinggi merupakan strategi yang dianggap paling tepat dalam kondisi yang dianalisis.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis dan Batas Administrasi

Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Lampung yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008. Pada Rencana Tata Ruang Kabupaten Pringsewu Tahun 2023-2043 disebutkan bahwa Kabupaten Pringsewu secara geografis terletak diantara $104^{\circ}46'16,91''$ sampai dengan $105^{\circ}5'52,33''$ Bujur Timur dan $5^{\circ}9'24,92''$ sampai $5^{\circ}34'35,10''$ Lintang Selatan. Kabupaten Pringsewu berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tanggamus, dan Kabupaten Pesawaran dengan rincian sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sendang Agung dan Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah.
2. Sebelah Timur berbatasan Kecamatan Negeri Katon, Kecamatan Gedongtataan, Kecamatan Waylima dan Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bulok dan Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pugung dan Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus.

Kabupaten Pringsewu terdiri dari 9 kecamatan yaitu Kecamatan Adiluwih, Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Gading Rejo, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Pagelaran Utara, Kecamatan Pardasuka, Kecamatan Pringsewu, dan Kecamatan Sukoharjo. 9 kecamatan tersebut terdapat 5 kelurahan yang berada di Kecamatan Pringsewu dan 126 desa atau

pekon yang berada di seluruh kecamatan. Luas masing-masing wilayah kecamatan dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Luas Wilayah Kabupaten Pringsewu per Kecamatan

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah	
			Km ²	Ha
1.	Adiluwih	Adiluwih	74,82	7.482
2.	Ambarawa	Ambarawa	30,99	3.099
3.	Banyumas	Banyumas	39,85	3.985
4.	Gading Rejo	Gading Rejo	85,71	8.571
5.	Pagelaran	Pagelaran	63,28	6.328
6.	Pagelaran Utara	Pagelaran Utara	109,47	10.947
7.	Pardasuka	Pardasuka	94,64	9.464
8.	Pringsewu	Pringsewu	53,29	5.329
9.	Sukoharjo	Sukoharjo	72,95	7.295
Jumlah			625,00	62.500

Sumber: Pringsewu Dalam Angka, 2022

Terdapat perubahan luasan Kabupaten Pringsewu sebagaimana perubahan batas administrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang batas Kabupaten Pringsewu yaitu:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2021 (Pringsewu – Tanggamus);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2022 (Pringsewu – Lampung Tengah);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2022 (Pringsewu – Pesawaran).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai wilayah yang berbatasan dengan wilayah administrasi Kabupaten Pringsewu tersebut, Kabupaten Pringsewu yang semula luasannya kurang lebih sebesar 625 km²

atau kurang lebih sebesar 62.500 hektare sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 menjadi seluas kurang lebih 61.719 hektare. Berikut luas wilayah Kabupaten Pringsewu per kecamatan sesuai dengan batas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut:

Tabel 14. Luas Wilayah Kabupaten Pringsewu per Kecamatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)
1.	Adiluwih	Adiluwih	6.880
2.	Ambarawa	Ambarawa	3.311
3.	Banyumas	Banyumas	4.271
4.	Gading Rejo	Gading Rejo	6.779
5.	Pagelaran	Pagelaran	4.842
6.	Pagelaran Utara	Pagelaran Utara	15.819
7.	Pardasuka	Pardasuka	8.731
8.	Pringsewu	Pringsewu	4.527
9.	Sukoharjo	Sukoharjo	6.559
Jumlah			61.719

Sumber: Materi Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu Tahun 2022-2042

B. Kondisi Fisik

Ditinjau dari segi elevasi, berdasarkan hasil interpretasi data *Shuttle Radar Topographic Mission* (SRTM), elevasi lahan di wilayah Kabupaten Pringsewu terbagi menjadi tiga kelas, yaitu 0-200 meter diatas permukaan laut (mdpl), 200-500 mdpl, dan 500-1500 mdpl. Untuk elevasi 500-1500 mdpl, merupakan daerah pegunungan terdapat di Kecamatan Pardasuka dan Kecamatan Pagelaran Utara. Termasuk di dalamnya adalah kawasan hutan lindung dan kawasan perkebunan. Di kedua kecamatan tersebut, merupakan

daerah tangkapan air, yang mendapat perhatian khusus dari Pemerintah dalam rangka mengamankan cadangan air.

Sebagian besar ketinggian lahan (elevasi) di Kabupaten Pringsewu berada pada posisi 0-200 mdpl, yaitu seluas 48.733 hektare atau sekitar 78,96%.

Elevasi ini tersebar diseluruh kecamatan di Kabupaten Pringsewu. Untuk ketinggian lahan 200-500 mdpl, seluas kurang lebih 10.855 hektare atau sekitar 17,59% dari total luasan wilayah Kabupaten Pringsewu, mayoritas terdapat di Kecamatan Pagelaran Utara dan Kecamatan Pardasuka serta sebagian kecil dari Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Pringsewu, Kecamatan Gading Rejo, dan Kecamatan Banyumas. Sedangkan elevasi tertinggi pada 500-1500 mdpl hanya terdapat di Kecamatan Pagelaran Utara dan Kecamatan Pardasuka. Untuk mengetahui sebaran elevasi di Kabupaten Pringsewu berdasarkan lokasi kecamatan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 15. Tingkat Elevasi Lahan di Kabupaten Pringsewu

No.	Kecamatan	Luas Elevasi (mdpl) per Kecamatan			Jumlah (Ha)	%
		0-200	200-500	500-1500		
1	Adiluwih	6.880	-	-	6.880	11,15
2	Ambarawa	3.311	-	-	3.311	5,36
3	Banyumas	4.258	13	-	4.271	6,92
4	Gading Rejo	6.759	20	-	6.779	10,98
5	Pagelaran	4.840	2	-	4.842	7,85
6	Pagelaran Utara	7.466	7.970	383	15.819	25,63
7	Pardasuka	4.157	2.826	1.748	8.731	14,15
8	Pringsewu	4.503	24	-	4.527	7,33
9	Sukoharjo	6.559	-	-	6.559	10,63
Jumlah		48.733	10.855	2.131	61.719	100,00
Prosentase		78,96	17,59	3,45	100	

Sumber: Materi Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu
Tahun 2022-2042

C. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Kabupaten Pringsewu tahun 2023 berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu adalah sebesar 408.415 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 210.015 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 198.400 jiwa. Wilayah yang sebaran penduduknya paling banyak adalah di Kecamatan Pringsewu, yang diikuti secara berturut turut Kecamatan Gading Rejo, Kecamatan Pagelaran, dan Kecamatan Sukoharjo. Sedangkan sebaran penduduk yang paling kecil terdapat di Kecamatan Pagelaran Utara. Namun sejalan dengan perkembangan Kabupaten Pringsewu yang cukup pesat, maka di Kecamatan Pagelaran Utara sangat berpotensi terjadi pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat tinggi, mengingat di kecamatan tersebut terdapat Bendungan Way Sekampung yang akan dijadikan sebagai pusat pertumbuhan perekonomian baru di Kabupaten Pringsewu. Secara rinci, jumlah dan sebaran penduduk di setiap Kecamatan dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 16. Jumlah dan Sebaran Penduduk di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018 – 2022

No	Kecamatan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Adiluwih	35.540	35.452	36.063	36.184	36.267
2	Ambarawa	34.852	35.914	36.387	36.509	37.695
3	Banyumas	20.959	21.352	21.292	21.363	21.482
4	Gading Rejo	74.482	76.705	77.727	77.987	78.181
5	Pagelaran	47.067	51.964	52.042	52.216	53.207
6	Pagelaran Utara	15.850	15.446	15.301	15.352	15.421
7	Pardasuka	35.066	35.811	35.174	35.292	37.410
8	Pringsewu	84.088	81.745	81.776	82.050	85.897
9	Sukoharjo	49.315	50.019	49.704	49.870	52.845
Jumlah		397.219	404.408	405.466	406.823	408.415

Sumber: Pringsewu Dalam Angka, 2023

Laju pertumbuhan penduduk menjadi salah satu aspek pertimbangan kebutuhan akan penggunaan lahan sebagai permukiman dengan melihat perkembangan penduduk pada wilayah perencanaan. Berikut adalah laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pringsewu:

Tabel 17. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pringsewu Tahun 2018 – 2022

No	Kecamatan	Tahun					Rata-Rata Laju Pertumbuhan Penduduk
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Adiluwih	0,75	0,65	0,64	0,432	0,23	0,5404
2	Ambarawa	0,75	0,66	0,64	0,434	0,51	0,5988
3	Banyumas	1,03	0,93	0,92	0,432	0,56	0,7744
4	Gading Rejo	0,70	0,60	0,59	0,433	0,24	0,5126
5	Pagelaran	0,49	0,40	0,37	0,432	0,20	0,3784
6	Pagelaran Utara	0,99	0,90	0,87	0,434	0,45	0,7288
7	Pardasuka	0,89	0,79	0,78	0,432	0,38	0,6544
8	Pringsewu	1,05	0,95	0,93	0,431	0,46	0,7642
9	Sukoharjo	1,03	0,93	0,91	0,432	0,23	0,7064
Kabupaten		0,84	0,75	0,73	0,433	0,36	0,6226

Sumber: Pringsewu Dalam Angka, 2023

Berdasarkan Tabel 17. dapat dilihat rata-rata laju pertumbuhan penduduk dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mayoritas termasuk dalam kategori tinggi. Walaupun pada tahun 2021 laju pertumbuhan penduduk pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Pringsewu tidak setinggi pada tahun 2020 namun secara rata-rata pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pringsewu mengalami peningkatan.

Tingkat kepadatan penduduk juga menjadi salah satu aspek dalam merencanakan wilayah terutama dalam melihat kompleksitas permasalahan yang muncul termasuk permasalahan sosial. Wilayah dengan kepadatan penduduk yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lain tentu saja memerlukan penanganan yang berbeda sebagai langkah antisipasi timbulnya konflik horizontal. Adapun tingkat kepadatan penduduk di Pringsewu, dapat dilihat pada Tabel 18.

Tabel 18. Kepadatan Penduduk di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018 – 2022

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)					Laju Kepadatan Penduduk
			2018	2019	2020	2021	2022	
1	Adiluwih	68,80	516,57	515,29	524,17	525,93	527,14	0,0018
2	Ambarawa	33,10	1.052,93	1.085,02	1.099,31	1.102,99	1.108,61	0,0083
3	Banyumas	42,71	490,73	499,93	498,52	500,19	502,97	0,0041
4	Gading Rejo	67,79	1.098,72	1.131,51	1.146,59	1.150,42	1.153,28	0,0042
5	Pagelaran	48,42	972,06	1.073,19	1.074,80	1.078,40	1.119,52	0,0607
6	Pagelaran Utara	158,19	100,20	97,64	96,73	97,05	97,48	0,0006
7	Pardasuka	87,32	401,58	410,11	402,82	404,17	428,42	0,0358
8	Pringsewu	45,27	1.857,48	1.805,72	1.806,41	1.812,46	1.897,44	0,1254
9	Sukoharjo	65,59	751,87	762,60	757,80	760,33	805,69	0,0669
Kabupaten		617,19	643,59	655,24	656,95	662,43	677,92	0,0228

Sumber : Pringsewu Dalam Angka, 2023

Rata-rata kepadatan penduduk pada masing-masing Kecamatan mengalami peningkatan sebagaimana dapat terlihat pada Tabel 17. walaupun sedikit sebagaimana terlihat pada Kecamatan Pagelaran Utara. Peningkatan kepadatan penduduk selaras dengan peningkatan jumlah penduduk, hal tersebut mengindikasikan kebutuhan lahan untuk tempat tinggal. Kebutuhan lahan untuk tempat tinggal inilah yang perlu menjadi perhatian terkait dengan fenomena alih fungsi lahan pertanian.

D. Kondisi Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dilihat melalui data perubahan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Konstan tiap tahunnya. Dimana PDRB Atas Dasar Harga Konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. Berdasarkan Data BPS Kabupaten Pringsewu, nilai PDRB Kabupaten Pringsewu sebagai berikut:

Tabel 19. PDRB Kabupaten Pringsewu Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (Milyar Rupiah)

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1806,12	1828,00	1838,33	1820,26	1859,31
B Pertambangan dan Penggalan	7,49	7,81	7,97	7,50	7,62
C Industri Pengolahan	1106,54	1165,82	1100,49	1149,66	1153,26
D Pengadaan Listrik dan Gas	5,43	5,82	6,33	6,57	6,88
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,78	3,94	4,11	4,39	4,57
F Konstruksi	910,96	965,15	941,44	998,29	1034,76
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1142,35	1220,60	1147,22	1212,53	1371,79
H Transportasi dan Pergudangan	332,07	359,41	346,03	353,34	407,82
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	169,31	185,01	179,66	178,17	197,73
J Informasi dan Komunikasi	426,21	460,23	503,42	535,40	537,77
K Jasa Keuangan dan Asuransi	289,57	295,20	304,70	313,20	302,25
L Real Estate	304,04	321,41	312,66	316,19	326,13
M,N Jasa Perusahaan	16,89	17,49	17,06	17,24	20,08

Tabel 19. Lanjutan

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	273,87	285,19	297,75	310,03	306,54
P Jasa Pendidikan	382,72	413,53	427,68	432,60	443,20
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	107,86	114,81	125,27	129,08	127,62
R,S,T,U Jasa Lainnya	85,29	92,09	87,55	85,72	106,82
PDRB	7370,49	7741,50	7647,66	7870,16	8214,16

Sumber: Pringsewu Dalam Angka, 2023

Berdasarkan data lima tahun terakhir diatas, PDRB Kabupaten Pringsewu mengalami pertumbuhan sebesar kurang lebih 843,67 triliun rupiah dalam rentang waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Berikut pertumbuhan ekonomi yang terdapat di Kabupaten Pringsewu dapat dilihat melalui laju pertumbuhan PDRB sebagai berikut:

Tabel 20. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2022

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,85	1,21	0,57	-0,98	2,15
B Pertambangan dan Penggalian	6,71	4,31	2,03	-5,83	1,57
C Industri Pengolahan	6,13	5,36	-5,60	4,47	0,32
D Pengadaan Listrik dan Gas	6,52	7,14	8,76	3,86	4,75
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,09	4,26	4,32	6,97	3,93
F Konstruksi	6,41	5,95	-2,46	6,04	3,65
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,18	6,85	-6,01	5,69	13,13
H Transportasi dan Pergudangan	6,85	8,24	-3,72	2,11	15,42
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,55	9,27	-2,89	-0,83	10,98

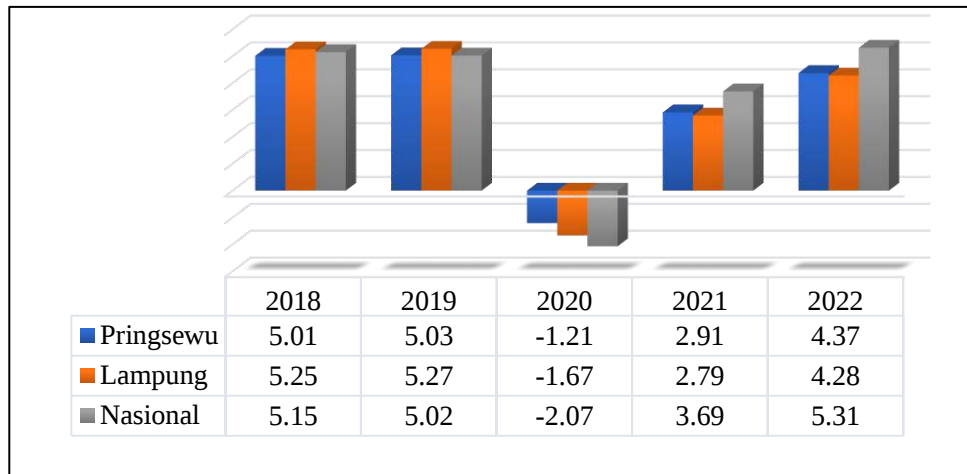
Tabel 20. Lanjutan

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
J Informasi dan Komunikasi	8,21	7,89	9,38	6,35	0,44
K Jasa Keuangan dan Asuransi	1,46	1,95	3,22	2,79	-3,50
L Real Estate	3,70	5,71	-2,72	1,13	3,14
M,N Jasa Perusahaan	5,71	1,54	3,52	-2,46	16,51
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,21	4,13	4,41	4,12	-1,13
P Jasa Pendidikan	7,12	8,05	3,42	1,15	2,45
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,31	6,45	9,11	3,05	-1,14
R,S,T,U Jasa Lainnya	9,20	7,97	-4,93	-2,09	24,62
Laju Pertumbuhan PDRB	5,01	5,03	-1,21	2,91	4,37

Sumber: Pringsewu Dalam Angka, 2022

Pada Tabel 20. dapat terlihat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pringsewu bersifat fluktuatif dan mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2020 namun mengalami kenaikan kembali pada tahun 2021. Penurunan pertumbuhan ekonomi pada tahun tersebut dialami seluruh wilayah di Indonesia karena wabah Covid-19. Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung dan Nasional maka kondisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pringsewu dapat dianggap stabil, yang dapat dilihat pada Gambar 2.

Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pringsewu berada di atas Nasional walaupun masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pringsewu mulai tahun 2020 justru berada di atas Provinsi Lampung, yang menunjukkan sektor usaha dominan di Kabupaten Pringsewu yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dapat bertahan pada kondisi pandemi Covid-19.



Gambar 2. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pringsewu
Sumber: Provinsi Lampung Dalam Angka, 2023

Untuk melihat struktur ekonomi di Kabupaten Pringsewu maka perlu diketahui elemen-elemen yang terdiri dari faktor produksi (pasar *input*), barang dan jasa (pasar *output*), rumah tangga, perusahaan, Pemerintah dan sistem ekonomi. Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat ditentukan oleh basis ekonomi yang menjadi unggulan daerah yang digambarkan dari struktur perekonomian daerah, dimana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi maka daerah perlu mendorong sektor yang menjadi unggulan daerah, yang tergambar dari data Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku. Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Pringsewu mengalami kenaikan dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, untuk mengetahui struktur Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Pringsewu Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 21. PDRB Kabupaten Pringsewu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (Milyar Rupiah)

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2634,67	2728,00	2805,34	2811,23	3073,72

Tabel 21. Lanjutan

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
B Pertambangan dan Penggalan	11,33	11,89	12,35	11,77	12,37
C Industri Pengolahan	1616,58	1742,50	1667,98	1776,32	1855,40
D Pengadaan Listrik dan Gas	6,68	7,30	7,90	8,48	8,98
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,70	5,97	6,26	6,76	7,11
F Konstruksi	1257,73	1353,15	1313,39	1442,95	1579,63
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1439,36	1599,90	1534,85	1649,82	2023,97
H Transportasi dan Pergudangan	470,71	512,38	503,48	523,19	670,64
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	270,31	299,95	293,35	292,61	333,08
J Informasi dan Komunikasi	572,73	622,51	675,47	702,15	710,82
K Jasa Keuangan dan Asuransi	419,66	435,49	447,75	484,90	507,54
L Real Estate	395,68	442,35	439,82	447,87	474,77
M,N Jasa Perusahaan	26,27	27,57	27,40	27,90	33,60
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	444,12	465,70	491,93	511,14	517,34
P Jasa Pendidikan	546,98	605,78	634,24	653,83	691,54
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	148,41	160,75	176,67	185,37	188,58
R,S,T,U Jasa Lainnya	122,22	135,85	127,97	126,03	163,23
PDRB	10389,15	11156,95	11166,16	11662,32	12852,32

Sumber: Pringsewu Dalam Angka, 2023

Sebagai perbandingan PDRB Kabupaten Pringsewu atas dasar harga berlaku sebagaimana terlihat pada Tabel 22., berikut adalah laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2018-2022:

Tabel 22. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2022

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	25,36	24,45	25,12	24,11	23,92
B Pertambangan dan Penggalian	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10
C Industri Pengolahan	15,56	15,62	14,94	15,23	14,44
D Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06
F Konstruksi	12,11	12,13	11,76	12,37	12,29
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,85	14,34	13,75	14,15	15,75
H Transportasi dan Pergudangan	4,53	4,59	4,51	4,49	5,22
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,60	2,69	2,63	2,51	2,59
J Informasi dan Komunikasi	5,51	5,58	6,05	6,02	5,53
K Jasa Keuangan dan Asuransi	4,04	3,90	4,01	4,16	3,95
L Real Estate	3,81	3,96	3,94	3,84	3,69
M,N Jasa Perusahaan	0,25	0,25	0,25	0,24	0,26
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,27	4,17	4,41	4,38	4,03
P Jasa Pendidikan	5,26	5,43	5,68	5,61	5,38
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,43	1,44	1,58	1,59	1,47
R,S,T,U Jasa Lainnya	1,18	1,22	1,15	1,08	1,27
PDRB	100	100	100	100	100

Sumber: Pringsewu Dalam Angka, 2023

Selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 berdasarkan Tabel 21. sampai dengan Tabel 22., struktur perekonomian di Kabupaten Pringsewu didominasi oleh empat sektor lapangan usaha, yaitu sektor A (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan), sektor C (Industri Pengolahan), sektor F (Konstruksi), dan sektor G (Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor). Terdapat sektor lapangan usaha yang mulai menunjukkan perannya dalam pembentukan PDRB yaitu lapangan usaha sektor H (Transportasi dan Pergudangan).

E. Prasarana Wilayah

Kabupaten Pringsewu sebagaimana disebutkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu memiliki sistem jaringan prasarana yang terdiri dari sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem jaringan prasarana lainnya. Sistem jaringan transportasi yang berada di Kabupaten Pringsewu terdiri dari Jalan Arteri Primer yaitu Ruas Rantau Tijang – Gedong Tataan serta Jalan Kolektor Primer yang terbagi menjadi kewenangan Provinsi dan Kabupaten. Sistem jaringan transportasi yang terdapat di Kabupaten Pringsewu selain Jalan Arteri Primer dan Jalan Kolektor Primer juga terdapat Terminal Penumpang Tipe C yang berada di Kecamatan Gading Rejo dan Kecamatan Pringsewu. Terdapat juga rencana pengembangan sistem jaringan transportasi berupa jalan bebas hambatan di Kabupaten Pringsewu yang direncanakan pembangunannya pada periode tahun 2030 – 2034 yaitu ruas jalan tol Bandar Lampung (SS Natar – Kota Agung).

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 188.K/HK.02/MEM.L/2021 tanggal 28 September 2021 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2030, pengembangan sistem jaringan energi Kabupaten Pringsewu direncanakan mampu meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan listrik yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Pringsewu. Keterbatasan akan listrik menjadi pemicu untuk mencari cara agar memperoleh energi listrik alternatif. Jaringan transmisi tenaga listrik yang mendukung kebutuhan energi listrik di Kabupaten Pringsewu meliputi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Betung – Kenten dengan kapasitas 275 kV, dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan kapasitas 150 kV yaitu jaringan listrik Besai – Bukit Kemuning, jaringan listrik Natar – Tegineneng, dan jaringan listrik Pagelaran – Gedong Tataan. Di Kabupaten Pringsewu juga terdapat

Gardu Induk Pagelaran yang terdapat di Kecamatan Pringsewu dengan kapasitas 1 x 30 MVA dan 1x 20 MVA.

Sistem jaringan telekomunikasi di Kabupaten Pringsewu berupa jaringan tetap yang berada di Kecamatan Gading Rejo, Kecamatan Pagelaran, dan Kecamatan Pringsewu, serta jaringan bergerak yang tersebar di seluruh Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Pringsewu. Sistem jaringan sumber daya air di Kabupaten Pringsewu terdiri dari sistem jaringan irigasi yaitu jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder, dan jaringan irigasi tersier. Pemanfaatan sumberdaya air untuk pertanian diarahkan pada sistem jaringan yang menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu, terutama untuk pertanian lahan basah melalui upaya pembangunan dan pengembangan saluran.

Pemanfaatan sumberdaya air untuk keperluan irigasi diarahkan pada pemanfaatan air permukaan yaitu air sungai, mata air dan air tanah. Peningkatan fungsi jaringan irigasi secara maksimal akan berhubungan langsung dengan upaya pemeliharaan dan perbaikan terhadap kerusakan jaringan irigasi saat ini dan faktor pendukung lainnya. Hal ini dikarenakan dengan jaringan irigasi yang baik maka air dapat mengalir lahan pertanian tanpa hambatan dan berjalan optimal.

Sungai Way Sekampung yang terdapat di Kabupaten Pringsewu merupakan bagian dari 7 (tujuh) Daerah Aliran Sungai (DAS) di Provinsi Lampung. Sungai Way Sekampung merupakan bagian dari daerah aliran Sungai Way Seputih, yang merupakan sumber utama pasokan air waduk Batutegi, yang digunakan sebagai sumber air baku produksi listrik bagi PLTA Batutegi, kebutuhan air minum penduduk, serta sumber air irigasi untuk wilayah Kabupaten Tanggamus bagian timur, termasuk wilayah Kabupaten Pringsewu bagian barat dan utara. Kabupaten Pringsewu memiliki 120 Daerah Irigasi dengan 1 (satu) daerah irigasi merupakan kewenangan pusat, 7 (tujuh) daerah irigasi kewenangan provinsi dan 112 daerah irigasi kewenangan kabupaten.

Sistem jaringan prasarana lainnya yang terdapat di Kabupaten Pringsewu meliputi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), sistem jaringan persampahan, sistem jaringan evakuasi bencana, dan sistem jaringan drainase.

F. Kondisi Lahan Pertanian Kabupaten Pringsewu

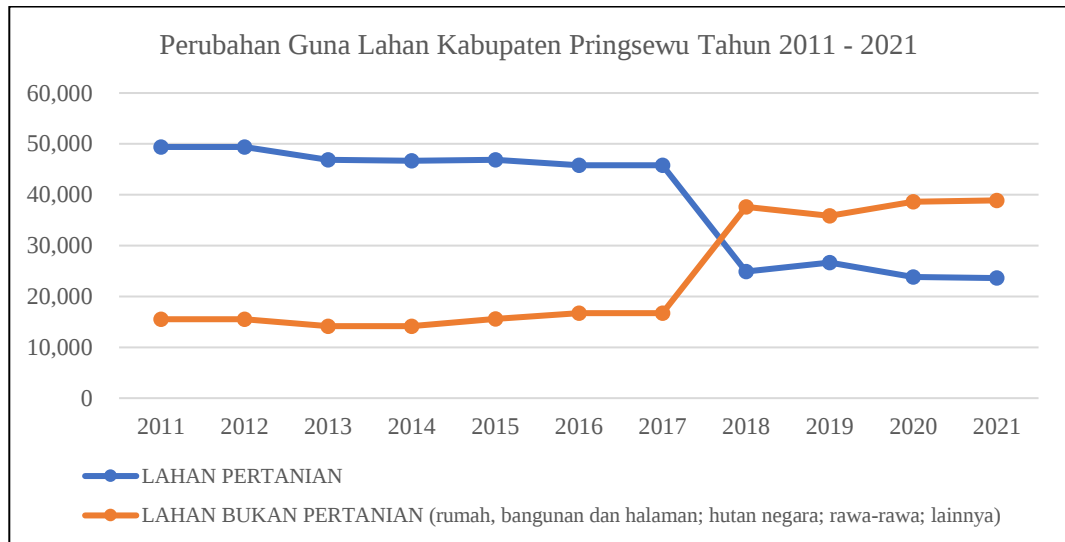
Dalam kurun waktu sepuluh tahun sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 terjadi perubahan guna lahan pertanian dan lahan non pertanian di Kabupaten Pringsewu. Berikut adalah data perubahan luas lahan berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu yang tertuang pada Pringsewu Dalam Angka Tahun 2011 - 2020:

Tabel 23. Perubahan Luas Lahan Pertanian dan Lahan Non Pertanian Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 – 2021 (dalam Hektare)

TAHUN	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
LAHAN PERTANIAN	49.391	46.889	46.689	46.894	45.778	45.778	24.889	26.669	23.858	23.613	23.501
Lahan Sawah	13.534	13.528	13.328	13.528	13.528	13.528	13.528	13.678	13.678	13.678	13.678
Irigasi (irigasi teknis; irigasi setengah teknis; irigasi sederhana; irigasi desa)	8.766	9.646	9.897	9.646	8.676	8.676	9.036	8.801	9.366	9.932	9.932
Tadah Hujan	4.768	3.882	3.431	3.882	4.852	4.852	4.492	4.877	4.312	3.746	3.746
Lahan Bukan Sawah (tegal; ladang; perkebunan; hutan rakyat; tambak; kolam/empang; lainnya)	35.857	33.361	33.361	33.366	32.250	32.250	11.361	12.991	10.810	9.935	9.823
LAHAN BUKAN PERTANIAN (rumah, bangunan dan halaman; hutan negara; rawa-rawa; lainnya)	15.534	14.159	14.159	15.606	16.722	16.722	37.611	35.831	38.642	38.887	38.999

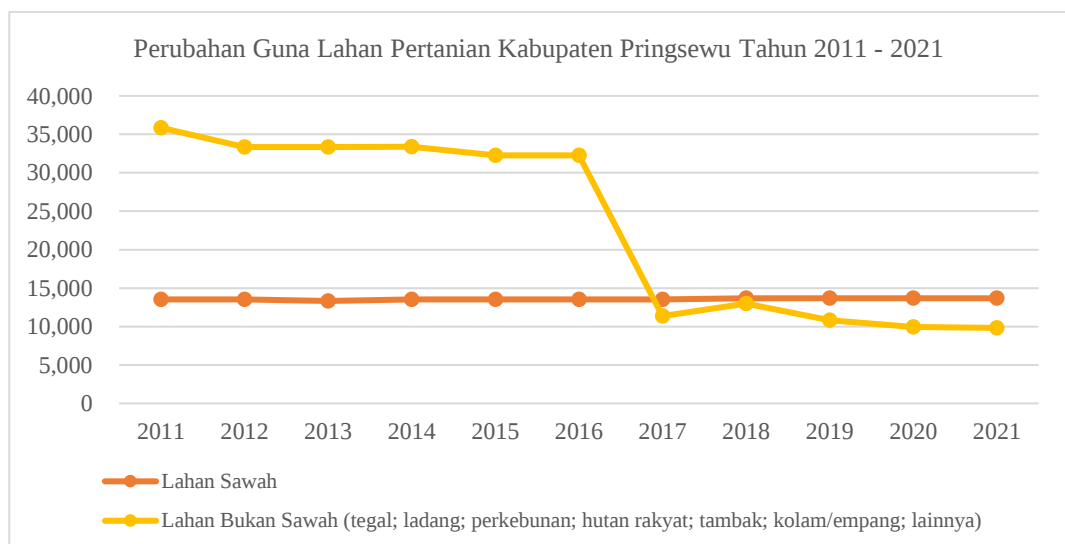
Sumber: Pringsewu Dalam Angka 2011-2019; Kecamatan Dalam Angka 2020-2021; Pringsewu Dalam Angka 2022; Analisis Peneliti, 2023

Tabel tersebut dikuatkan pada grafik perubahan guna lahan dan grafik perubahan guna lahan pertanian di bawah ini:



Gambar 3. Grafik Perubahan Guna Lahan Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 – 2021 (dalam Hektare)

Sumber: Analisis Peneliti, 2021



Gambar 4. Grafik Perubahan Guna Lahan Pertanian (Sawah dan Bukan Sawah) Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 – 2021 (dalam Hektare)

Sumber: Analisis Peneliti, 2021

Berdasarkan data yang tersebut pada Tabel 23. yang juga tergambar pada Gambar 3. dan Gambar 4., dapat terlihat lahan pertanian pada tahun 2011 di Kabupaten Pringsewu seluas 49.391 hektare yang terdiri dari 13.534 hektare lahan sawah dan 35.857 hektare bukan lahan sawah. Luas lahan pertanian tersebut mengalami perubahan pada tahun 2012 dimana lahan pertanian berkurang luasannya sebesar 2.502 hektare menjadi 46.889 hektare, dimana luasan yang berkurang terdiri dari 6 hektare lahan sawah dan 2.496 hektare lahan bukan sawah. Kemudian pada tahun 2013 terjadi perubahan luasan lahan pertanian lagi menjadi 46.689 hektare berupa pengurangan lahan sawah sebesar 200 hektare.

Pada tahun 2014 terjadi penambahan luasan lahan pertanian sebesar 205 hektare. Penambahan luasan lahan pertanian tersebut berupa penambahan sawah tadah hujan sebesar 451 hektare dan lahan bukan sawah sebesar 5 hektare, namun terjadi pengurangan luasan sawah irigasi seluas 251 hektare. Hal ini mengindikasikan penggunaan lahan sawah pada tahun tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh faktor seperti pola curah hujan. Pada tahun 2015 juga terjadi pengurangan luasan pertanian sebesar 1.116 hektare dimana pengurangan luasan terjadi pada lahan bukan sawah, namun yang menarik adalah terjadi pengurangan luasan lahan sawah irigasi dan penambahan luasan lahan sawah tadah hujan sebesar 970 hektare. Hal tersebut menunjukkan terjadinya perubahan cara tanam dimana masyarakat memanfaatkan irigasi menggunakan air hujan yang mengindikasikan tidak tersedianya air pada sawah irigasi teknis.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu yang terdapat pada Tabel 23. tersebut, tidak terjadi perubahan penggunaan lahan pada tahun 2016. Pada tahun 2017 terjadi perubahan yang signifikan pada luas penggunaan lahan di Kabupaten Pringsewu dimana luasan lahan pertanian bukan sawah berkurang sebesar 20.889 hektare yang berubah menjadi lahan bukan pertanian, sehingga dapat dikatakan terjadi alih fungsi lahan pertanian yang cukup besar. Pada tahun tersebut juga terjadi penambahan luas lahan

sawah irigasi sebesar 360 hektare yang sesuai dengan pengurangan luasan lahan sawah tadah hujan.

Pada Tabel 23. juga dapat terlihat pada tahun 2021 dengan menurunnya luasan total lahan pertanian justru luas lahan sawah bertambah sebesar 112 hektare dimana luas lahan sawah irigasi bertambah sebesar 1.166 hektare dalam kurun waktu sepuluh tahun dan luas lahan sawah tadah hujan berkurang sebesar 1.022 hektare.

Dengan berkurangnya luas total lahan pertanian namun bertambahnya luas lahan sawah dalam periode sepuluh tahun, dapat disimpulkan bahwa terjadi perubahan pola penggunaan lahan pertanian, dengan lebih banyak lahan yang dikonversi menjadi lahan sawah. Selain itu, terjadi pergeseran dari lahan sawah tadah hujan ke lahan sawah irigasi, yang mengindikasikan peningkatan penggunaan teknologi irigasi dalam pertanian. Hal ini juga menunjukkan adanya upaya Pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan air untuk irigasi sawah berupa pembangunan jaringan irigasi selama sepuluh tahun dari tahun 2011 ke tahun 2021.

Pada grafik perubahan guna lahan pertanian Kabupaten Pringsewu yang terdapat pada Gambar 3. dan Gambar 4., selama rentang waktu sepuluh tahun terakhir justru dapat dilihat tren perubahan yang terjadi secara signifikan adalah lahan bukan sawah pada tahun 2017. Perubahan peningkatan lahan bukan pertanian kurang lebih sebesar 23.281 hektare sejak tahun 2014, termasuk di dalamnya rumah serta bangunan dan halaman. Pada grafik tersebut dapat disimpulkan perubahan lahan pertanian menjadi lahan bukan pertanian didominasi oleh alih fungsi lahan pertanian bukan sawah.

Perubahan guna lahan menjadi permukiman baik dari lahan sawah maupun lahan bukan sawah seperti tegal, ladang, maupun perkebunan selaras dengan perbandingan peta guna lahan Kabupaten Pringsewu Tahun 2012 dengan peta guna lahan Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 yang terlihat pada Gambar 5 dan Gambar 6.

PETA GUNA LAHAN KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2012



Keterangan:



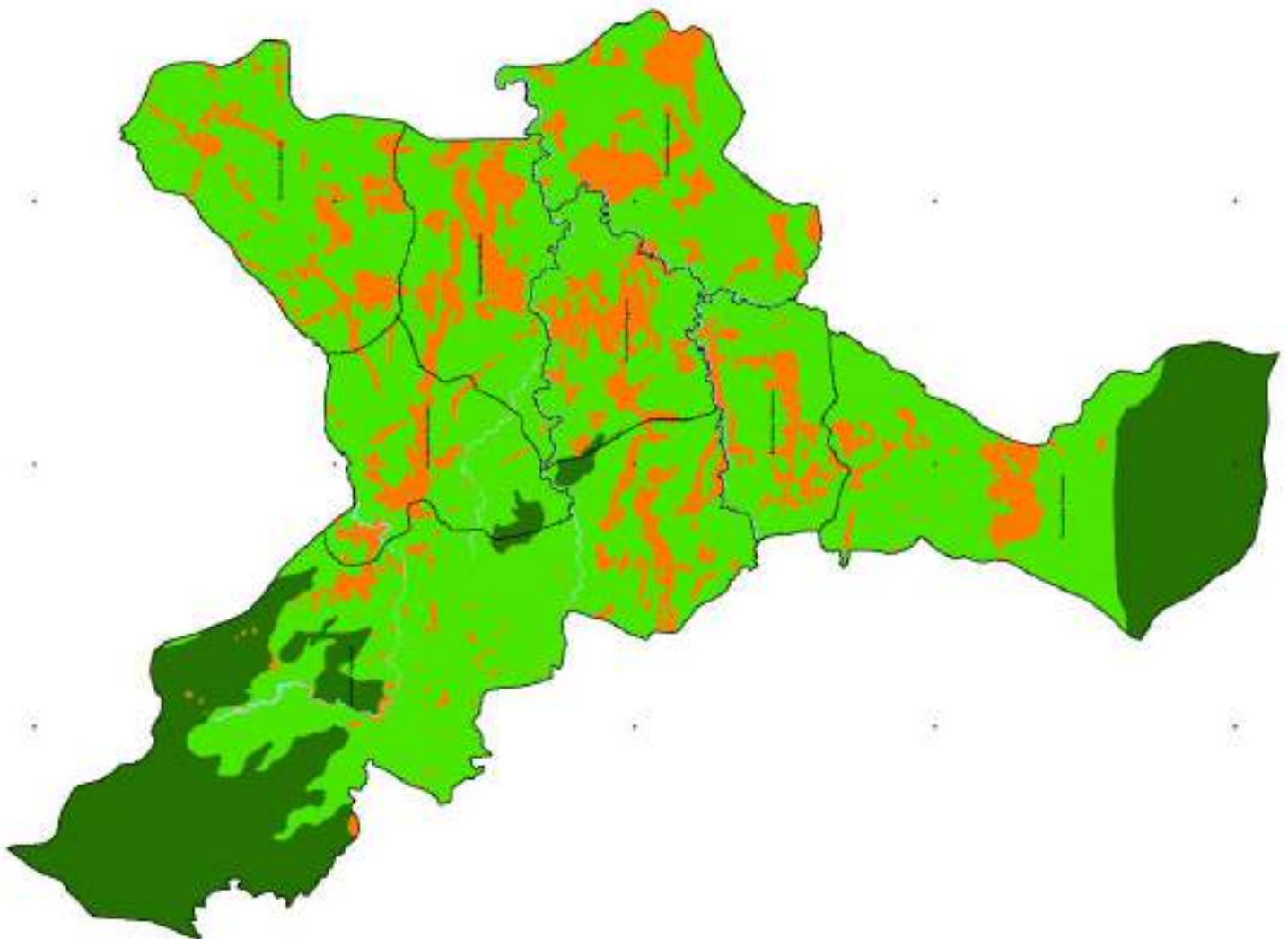
Catatan:

Lahan Pertanian terdiri dari Sawah, Perkebunan dan Tegalan
Lahan Non Pertanian terdiri dari Permukiman, Belukar, dan
Tanah Kosong

Dibuat Oleh:
Rani Sukren
NPM. 2020012091



MAGISTER PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
PASCASARJANA MULTIDISIPLIN
UNIVERSITAS LAMPUNG



PETA GUNA LAHAN KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017

Skala 1:50,000



Keterangan:

- Lahan Pertanian (38.130,09 Ha)
- Lahan Non Pertanian (18.047,96 Ha)
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten

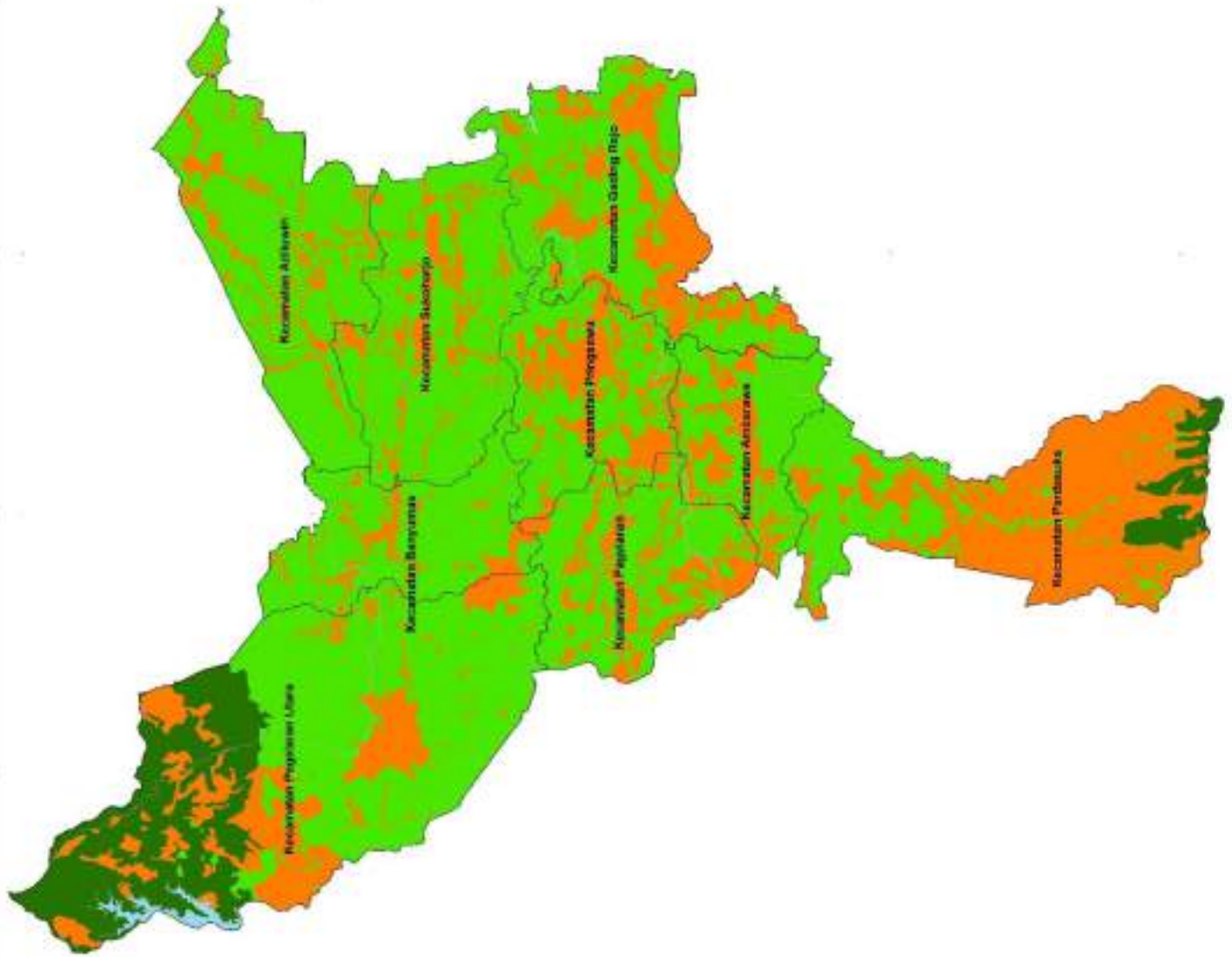
Catatan:

Lahan Pertanian terdiri dari Sawah, Perkebunan dan Tegalan
Lahan Non Pertanian terdiri dari Pemukiman, Betukar, dan
Tandi Kosong

Dibuat Oleh:
Rani Sukma
NPM. 2010052001

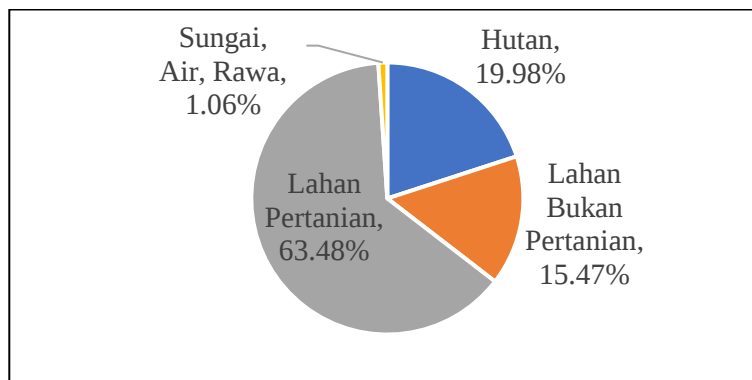


MAGISTER PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
PASCASARJANA MULTIDISIPLIN
UNIVERSITAS LAMPUNG

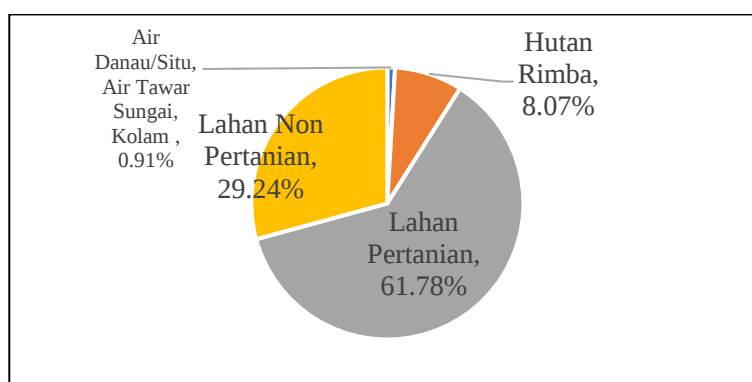


Pada Peta Guna Lahan Pertanian dan Permukiman Kabupaten Pringsewu pada tahun 2012 dan 2017, dapat terlihat pertambahan luasan lahan non pertanian di Kabupaten Pringsewu seluas kurang lebih 8.042 hektare dimana didalamnya terdapat permukiman yang selaras dengan menurunnya luasan pertanian sebesar 2.931 hektare sebagaimana tergambar pada Gambar. 5 dan Gambar. 6.

Berikut adalah perbandingan prosentase luas lahan pertanian dengan luas lahan bukan pertanian dibandingkan dengan total luas wilayah Kabupaten Pringsewu.



Gambar 7. Prosentase Perbandingan Luasan Guna Lahan terhadap Luas Wilayah Kabupaten Pringsewu Tahun 2012
Sumber: Analisis Peneliti, 2024



Gambar 8. Prosentase Perbandingan Luasan Guna Lahan terhadap Luas Wilayah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017
Sumber: Analisis Peneliti, 2024

Pada diagram yang terlihat di Gambar 7. dan Gambar 8. dapat terlihat prosentase mayoritas kontribusi penggunaan lahan di Kabupaten Pringsewu lahan pertanian adalah lahan pertanian pada tahun 2012. Meskipun masih menjadi kontribusi terbesar dalam penggunaan lahan di Kabupaten Pringsewu, terjadi penurunan prosentase luasan penggunaan lahan pertanian di tahun 2017 seiring dengan bertambahnya prosentase luas lahan bukan pertanian di Kabupaten Pringsewu.

Kabupaten Pringsewu sudah memiliki Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dimana sudah tersebutkan penentuan luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada masing-masing kecamatan yaitu Kecamatan Adiluwih seluas 201 hektare, Kecamatan Ambarawa seluas 1.626 hektare, Kecamatan Banyumas seluas 393 hektare; Kecamatan Gading Rejo seluas 2.067 hektare, Kecamatan Pagelaran seluas 950 hektare, Kecamatan Pagelaran Utara seluas 50 hektare, Kecamatan Pardasuka seluas 1.494 hektare, Kecamatan Pringsewu seluas 808 hektare, dan Kecamatan Sukoharjo seluas 556 hektare.

Namun penentuan luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan per kecamatan pada Peraturan Daerah tersebut hanya berdasarkan pada data tabular sehingga perlu dilakukan pengecekan kembali kemampuan lahan pertanian dari masing-masing kecamatan untuk ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan disimpulkan hal sebagai berikut:

1. Sebaran lahan sawah di Kabupaten Pringsewu berdasarkan peta hasil analisis lahan pertanian pangan berkelanjutan didapatkan beberapa hal yaitu:
 - a. Luas lahan sawah yang dapat ditetapkan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Pringsewu sebesar 8.159 hektare dengan luas hamparan terkecil sebesar 22,5 hektare berada di Kecamatan Gading Rejo dan luas hamparan terbesar berada di Kecamatan Pardasuka dengan luas 409,19 hektare.
 - b. Dari luas 8.159 hektare sawah yang dapat ditetapkan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan tersebut terdapat selisih kekurangan ketersediaan lahan sawah apabila dibandingkan dengan luasan per Kecamatan yang terdapat pada Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Pringsewu yaitu pada Kecamatan Banyumas sebesar 224 hektare (56,99%) dan Kecamatan Gading Rejo sebesar 231 hektare (11,118%).
 - c. Luas sawah yang dapat ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan tersebut tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Pringsewu dengan rincian masing-masing luasan per kecamatan sebagai berikut Kecamatan Adiluwih seluas 252 hektare, Kecamatan Ambarawa seluas 1.637 hektare, Kecamatan Banyumas seluas 169 hektare, Kecamatan Gading Rejo seluas 1.836 hektare, Kecamatan Pagelaran seluas 1.000 hektare, Kecamatan Pagelaran Utara seluas 64 hektare, Kecamatan Pardasuka seluas 1.724 hektare, Kecamatan Pringsewu seluas 869 hektare, dan Kecamatan Sukoharjo seluas 608

hektare. Luas lahan pertanian pangan berkelanjutan terbesar berada di Kecamatan Gading Rejo sebesar 22,50% dari total lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Pringsewu, sementara Kecamatan Pagelaran Utara memiliki jumlah luas lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Pringsewu yaitu hanya sebesar 0,78% dari total luas lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Pringsewu.

- d. Luas lahan sawah di Kabupaten Pringsewu sebesar 8.159 hektare tersebut hanya seluas 3.270 hektare atau 40,08% yang terdukung oleh irigasi dengan asumsi air yang terdapat di jaringan irigasi tersedia, sementara sawah dengan luas 4.889 hektare atau 59,92% lainnya tidak terdukung irigasi.

2. Alternatif strategi prioritas dalam mencapai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui implementasi kebijakan di Kabupaten Pringsewu yaitu:

- a. Melengkapi Perda PLP2B dengan spasial penentuan lokasi yang ditetapkan menjadi LP2B sehingga terdapat kepastian sawah yang ditetapkan menjadi LP2B,
- b. Penyusunan peta LP2B sebagai acuan dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat,
- c. Meningkatkan koordinasi antar Pemerintah dalam rangka pemeliharaan dan perbaikan jaringan irigasi eksisting untuk menjamin air irigasi;
- d. Pembangunan embung untuk menjamin ketersediaan air irigasi; dan
- e. Delineasi lahan sawah berdasarkan kondisi terkini untuk mendapatkan data terbaru untuk melihat lahan potensial yang dapat dipetakan menjadi LP2B.

Dari kelima strategi prioritas tersebut dapat terlihat keterkaitan antarstrategi dalam rangka optimalisasi implementasi kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Pringsewu. Kelima strategi

tersebut menjadi prioritas untuk saat ini dengan anggapan merupakan langkah yang harus segera dilakukan sebagai upaya melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan Kabupaten Pringsewu. Pada kelima strategi tersebut juga terlihat pentingnya koordinasi antarinstansi seperti Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan dari hasil analisis dan pembahasan pada penelitian ini adalah:

1. Bagi pemangku kebijakan:
 - a. Perlu adanya perhatian dari Pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten, terkait dengan tata kelola air khususnya penyediaan air irigasi pada lahan sawah terutama pada lahan yang nantinya ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Pringsewu.
 - b. Pemerintah Kabupaten Pringsewu perlu merevisi Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang sudah ada dengan menyusun pedoman spasial yang harus terintegrasi dengan kebijakan sektoral pada perangkat daerah terkait khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu.
 - c. Masyarakat perlu memahami pentingnya LP2B dan terlibat secara aktif dalam memberikan informasi terkait keberadaan lahan sawah yang dapat ditetapkan menjadi LP2B.
2. Bagi peneliti lain diharapkan dapat melakukan analisis penentuan *by name by address* (BNBA) terkait dengan lokasi lahan sawah yang akan ditentukan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Pringsewu dengan harapan insentif yang diberikan akan menjadi tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, I. H. 2020. Kajian Tentang Konsep Keberlanjutan Pada Beberapa Kota Baru dan Permukiman Berskala Besar. *Jurnal PWK Unisba*, 38–55.
- Anshar, M. 2014. *Perencanaan Kawasan Perdesaan Berbasis Agropolitan*.
- Anwar, S. A. 2020. Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Dinas Pertanian Kabupaten Bandung. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 12–26.
- Astuti, A. M. I., & Ratnawati, S. 2020. Analisis SWOT Dalam Menentukan Strategi Pemasaran (Studi Kasus di Kantor Pos Kota Magelang 56100). *Jurnal Ilmu Manajemen*, 17(2), 58–70.
- Budi, D. A., Soeaidy, M. S., & Hadi, M. 2013. Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Keterampilan Dasar (Studi Di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 1(5), 862–871.
- Fahmi, M. A. 2010. Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam Program Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan pada Kawasan Pangan. *Skripsi*, 15(1), 156–179.
<http://epa.sagepub.com/content/15/2/129.short%0Ahttp://joi.jlc.jst.go.jp/JST.Journalarchive/materia1994/46.171?from=CrossRef>
- Fajriyah, L. W. 2018. Strategi Pemasaran Tahubaxo Ibu Pudji Ungaran dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Skripsi*, 372(2), 2499–2508.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7556065%0Ahttp://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=PMC394507%0Ahttp://dx.doi.org/10.101>

6/j.humpath.2017.05.005%0Ahttps://doi.org/10.1007/s00401-018-1825-z%0Ahttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27157931

- Gita, I., & Mulyadi, M. 2019. Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Partisipatif Berbasis Komunitas (P3BK) di Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi. *Jurnal Aspirasi*, 10(1), 61–75.
<https://doi.org/10.22212/aspirasi.v10i1.1255>
- Handari, A. W. 2012. Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Magelang. *Tesis*.
- Hanna, S., & Munasinghe, M. 1995. An Introduction to Property Rights and the Environment. In *Property Rights and the Environment: Social and Ecological Issues* (Issue July 1995).
- Hatmanto, T., & Setyono, J. S. 2018. Implementasi Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) melalui Penggunaan Peta Spasial Studi Kasus di Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. *Seminar Nasional Geomatika*, 3, 735. <https://doi.org/10.24895/sng.2018.3-0.1032>
- Hidayati, O., Siregar, H., & Falatehan, A. F. 2017. Konversi Lahan Sawah di Kota Bogor dan Strategi Anggaran dalam Mengendalikannya. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 1(2), 217.
<https://doi.org/10.29244/jp2wd.2017.1.2.217-230>
- Hora, S. C. 2004. *Probability Judgments for Continuous Quantities: Linear Combinations and Calibration*.
- Iskandar, I., Miftah, H., & Yusdiarti, A. 2016. Implementasi Program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Kabupaten Garut Jawa Barat (Kasus di Desa Jati Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut). *Jurnal Agribisains*, 2(2), 11–21.

<https://doi.org/10.30997/jagi.v2i2.775>

- Lestari, Kristiningsih, & Herawati, W. 2021. *Manajemen Strategik, Pendekatan Analisis Kasus*. Fakultas Ekonomi Universitas Wijaya Kusuma.
- Ma'ruf, A., & Wihastuti, L. 2008. *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia : Determinan dan Prospeknya*. 9(April), 44–55.
- Mahfud, T., & Mulyani, Y. 2017. Aplikasi Metode QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix). *Jurnal Sosisal Humanioradan Pendidikan*, 1(1), 66–76.
- Mujiono, & Fitria, I. 2019. Model Spasial Perubahan Lahan Sawah Untuk Mendukung Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Di Kabupaten Seluma. *Agritrop : Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian (Journal of Agricultural Science)*, 17(1), 113.
<https://doi.org/10.32528/agritrop.v17i1.2193>
- Nasoetion, L. I. 2003. Konversi Lahan Pertanian : Aspek Hukum dan Implementasinya Agricultural Land Conversion : Judicial Aspect and. *Prosiding Seminar Nasional Multifungsi Dan Konversi Lahan Pertanian*, 41–55.
- Pardede, M. 2019. Hak Menguasai Negara Dalam Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah dan Peruntukannya. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(4), 405. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.405-420>
- Pitaloka, E. D. A. 2020. Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Dimensi Politik Hukum Penataan Ruang. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 8(1), 49. <https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.718>
- Pramudita, D., Dharmawan, A. H., & Barus, B. 2015. Kesesuaian Sosial Ekonomi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten

Kuningan. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 3(2).

<https://doi.org/10.22500/sodality.v3i2.11337>

Prasada, I. M. Y., & Priyanto, M. W. 2019. Dampak Implementasi Perda

Perlindungan Lahan. *Agritech*, XXII(2), 140–154.

<http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/AGRITECH/article/view/4252/295>

5

Pratama, A., Amin, M., Asmara, S., & Rosadi, B. 2018. Analisis Spasial Lahan

Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Di Kabupaten Pesawaran. *Jurnal Teknik Pertanian Lampung (Journal of Agricultural Engineering)*, 7(1), 41.

<https://doi.org/10.23960/jtep-l.v7i1.41-50>

Qanita, A. 2020. Analisis Strategi Dengan Metode Swot Dan Qspm (Quantitative

Strategic Planning Matrix): Studi Kasus Pada D'Gruz Caffe Di Kecamatan Bluto Sumenep. *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 1(2), 11–24.

<https://doi.org/10.15575/jim.v1i2.10309>

Rivai, R. S., & Anugrah, I. S. 2011. Konsep Dan Implementasi Pembangunan

Pertanian Berkelanjutan di Indonesia Concept and Implementation of Sustainable Agricultural Development in Indonesia. *Pusat Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian*, 13–25.

RKH Nugrahani, B. K. 2019. Dinamika Implementasi Kebijakan Penetapan

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul. *Dinamika Implementasi Kebijakan Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lp2B) Di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul*.

Rosana, M. 2018. Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan

Lingkungan di Indonesia. *Jurnal KELOLA: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(1), 148–163.

- Sakti, M. A., Sunarminto, B. H., Maas, A., Indradewa, D., & Kertonegoro, B. D. 2013. Kajian Pemetaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Purworejo. *Jurnal Ilmu Tanah Dan Agroklimatologi*, 10(c), 2–6.
- Sari, D. 2020. Analisis Strength Weakness Opportunity Threat (Swot) Dalam Menentukan Strategi Pemasaran Penjualan Roti. *PRAGMATIS Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 1(1), 7–14.
- Satria, J., Falatehan, A. F., & Beik, I. S. 2018. Strategi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Bogor. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 10(2).
https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v10i2.27786
- Silfiana, L., & Samsuri. 2019. Keterlibatan Warga Negara Muda Dalam Gerakan Kewarganegaraan Ekologis Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan. *Jurnal Studi Pemuda*, 8(2), 127–139.
- Siroj, M. Z., & Lukmandono, L. 2021. Analisis SWOT dan QSPM untuk Meningkatkan Kinerja SDM di PT. Elang Jagad Sidoarjo. *Prosiding SENASTITAN: Seminar ...*, 170–175.
<https://ejournal.itats.ac.id/senastitan/article/view/1621>
- Sumarno. 2012. Konsep Pertanian Modern, Ekologis dan Berkelanjutan. *Artikel*, 1993, 33–59.
- Suparmoko, M. 2020. Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional dan Regional. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(1), 39–50.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*.

Tarigan, R. 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wicaksono, A. 2020. Implementasi Program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Karawang: Studi Kasus Penetapan Luas Baku Sawah. *Jejaring Administrasi Publik*, 12(9), 89–107.

Wulandari, D. A., & Rahman, A. Z. 2017. Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Tegal (Studi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun (2012-2032). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.

Pemerintah Indonesia. 2011. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185.

Pemerintah Indonesia. 2012. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279.

Pemerintah Indonesia. 2012. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 46 Nomor 2012.

Pemerintah Indonesia. 2012. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia. 2012. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 205.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia. 2013. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Kesesuaian Lahan pada Komoditas Tanaman Pangan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1041.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia. 2013. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 80/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Kriteria dan Tata Cara Penilaian Petani Berprestasi Tinggi pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1042.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia. 2013. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1043.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. 2021. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329.

Pemerintah Provinsi Lampung. 2013. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 398.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat. 2014. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63.

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. 2015. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015 Nomor 05.

Pemerintah Kabupaten Pringsewu. 2015. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2015 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 06.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. 2016. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02.

Pemerintah Kota Metro. 2016. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Lembaran Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21.

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. 2017. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Lampung Selatan. Lembaran Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8.

<https://dosenpertanian.com/lahan-pertanian>

<https://axaq.blogspot.com/2016/08/jaringan-irigasi-pengertian-sistem.html>

<https://glosarium.org/arti-daerah-irigasi>

<https://bpusdataru-pc.jatengprov.go.id/daerah-irigasi>

<https://text-id.123dok.com/document/ozlmmjmggy-pengertian-pola-tanam-jenis-jenis-pola-tanam.html>

<https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-peta>

<http://www.guntara.com/2013/01/pengertian-overlay-dalam-sistem.html>